

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021

PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Jl. Mgr. Soegijopranoto 105, Telp. (0298) 595259, Fax. (0298) 593844

Website : <http://www.pa-ambarawa.go.id>, email : [pa\\_ambarawa20@yahoo.co.id](mailto:pa_ambarawa20@yahoo.co.id)

## PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.*

*Bismillahirrohmannirrohiim*

Segala puji bagi Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada tahun anggaran 2021 kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan tahunan 2021 dan sholawat serta salam kita curahkan kepada nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga-Nya, sahabat-Nya dan pengikut-Nya sampai akhir zaman.

Laporan tahunan ini merupakan laporan tahun kelima sebagai implementasi Rencana Strategis 2020-2024 serta laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2021 yang akan disampaikan menyusul kemudian.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Ambarawa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2021, dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

Ambarawa, 31 Desember 2021

KETUA  
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

ISHAK LUBIS, S.AG  
NIP. 19690622.199703.1.001



## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
PENDAHULUAN .....	1
A.    KEBIJAKAN UMUM PERADILAN.....	1
1.    Manajemen Aparatur Pengadilan Agama Ambarawa .....	1
2.    Manajemen Perkara.....	2
3.    Pelayanan Informasi.....	3
4.    Manajemen Administrasi Umum .....	3
5.    Manajemen Keuangan .....	4
6.    Pengawasan .....	4
B.    VISI DAN MISI .....	4
1.    VISI .....	4
2.    MISI .....	5
C.    RENCANA STRATEGIS .....	5
PENYELESAIAN PERKARA .....	7
A.    Keadaan Perkara .....	7
B.    Penyelesaian Perkara .....	7
1.    Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus .....	7
2.    Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.....	8
3.    Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali .....	12
4.    Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi.....	14
5.    Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi .....	15
C.    Perkara Bagi Masyarakat Kurang Mampu .....	15
Posbakum.....	15
Perkara Prodeo .....	16
SUMBER DAYA MANUSIA.....	17

A. Sumber Daya Manusia .....	17
1. Mutasi .....	18
2. Promosi .....	19
3. Pensiun.....	19
4. Diklat Sdm Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat .....	20
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TENOLOGI INFORMASI ...	21
A. PENGELOLAAN KEUANGAN.....	21
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.....	21
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung .....	23
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan .....	25
4. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .....	27
5. Rekapitulasi Keuangan Perkara 2021.....	28
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.....	28
1. Sarana Perkantoran .....	28
2. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	33
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	33
Implementasi e-court.....	33
implementasi sipp.....	34
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	35
D. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU .....	35
E. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU .....	36
F. INOVASI PELAYANAN PUBLIK.....	38
PENGAWASAN .....	39
A. INTERNAL .....	39
B. EVALUASI.....	40
1. Program Penyelesaian Perkara .....	40
2. Program Manajemen SDM.....	42
3. Program Pengelolaan Website.....	43
4. Program Pelayanan Publik dan Meja Informasi.....	45
5. Program Implementasi SIPP.....	45
6. Program Perkara PRODEO .....	46

7. Pengawasan .....	46
PENUTUP.....	47
A. KESIMPULAN .....	47
B. REKOMENDASI .....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	iv
LAMPIRAN .....	A
Data Detil Perkara .....	B
Sisa Perkara Tahun 2018 .....	B
Perkara Tahun 2019 .....	D
Rasio Perkara Terhadap Majelis.....	G
Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali .....	H
Pos Bantuan Hukum.....	M
Kegiatan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana .....	O
Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat pendidikan .....	O
Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang.....	P
Statistik Pegawai Berdasarkan jenis kelamin.....	P
Statistik Pegawai Berdasarkan Rentang usia .....	Q
Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Ambarawa.....	R
Kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan.....	S
Realisasi Anggaran Dipa Badan urusan Administrasi.....	S
Realisasi Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama .....	T
Kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan .....	U
Komparasi Rencana Penarikan Anggaran dengan Realisasi Anggaran DIPA Badan urusan Administrasi .....	U
Komparasi Rencana Penarikan Anggaran dengan Realisasi Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama .....	V
Komparasi Rencana Penerimaan Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi .....	W
Komparasi Rencana Penerimaan Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama .....	X
Daftar Revisi DIPA .....	Y



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN .....	A
Data Detil Perkara .....	B
Sisa Perkara Tahun 2020 .....	B
Perkara Tahun 2021 .....	D
Rasio Perkara Terhadap Majelis.....	G
Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali .....	H
Kegiatan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana .....	O
Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat pendidikan .....	O
Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang.....	P
Statistik Pegawai Berdasarkan jenis kelamin .....	P
Statistik Pegawai Berdasarkan Rentangusia .....	Q
Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Ambarawa.....	R
Kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan.....	S
Realisasi Anggaran Dipa Badan urusan Administrasi.....	S
Realisasi Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama .....	S
Kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan .....	U
Komparasi Rencana Penarikan Anggaran dengan Realisasi Anggaran DIPA Badan urusan Administrasi .....	U
Komparasi Rencana Penarikan Anggaran dengan Realisasi Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama .....	V
Komparasi Rencana Penerimaan Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama .....	W
Komparasi Rencana Penerimaan Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama .....	X
Daftar Revisi DIPA .....	Y

### A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Salah satu upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Ambarawa adalah salah satu lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah. Sebagai badan publik di sektor yudikatif, Pengadilan Agama Ambarawa berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara akurat, benar dan tidak menyesatkan.

---

#### 1. MANAJEMEN APARATUR PENGADILAN AGAMA AMBARAWA.

Jumlah aparatur Pengadilan Agama Ambarawa pada bulan Januari sebanyak 24 orang, termasuk 2 orang CPNS terdiri dari Pengadministrasi Registrasi Perkara dan Anilis Perkara Peradilan.

Pada bulan Februari terdapat penambahan Hakim yaitu Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. yang sebelumnya berasal dari Pengadilan Agama Madiun Klas II.

Pada bulan Juni terdapat promosi Panitera Pengganti yaitu M Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sragen Kelas I.A. Dan terdapat mutasi masuk Panitera Pengganti yaitu Nailatussa'adah, S.H. yang sebelumnya berasal dari Pengadilan Agama Demak I.B. Serta terdapat penggantian Panitera Muda Permohonan yang mana Mohammad Adib Fajrudin, S.Ag. mutasi keluar sebagai Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama

Demak Kelas I.B. dan digantikan oleh Handayani, S.H. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Salatiga Kelas I.B. menjadi Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I.B.

Pada bulan Juli terdapat promosi Wakil Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I.B yaitu Ishak Lubis, S.Ag menjadi Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I.B menggantikan Drs. H. Musthofa Kamal, M.H. yang dipromosikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Indramayu Kelas I.A.

Pada bulan Agustus terdapat promosi Wakil Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I.B yaitu Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy., M.Sy. yang sebelumnya sebagai Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Kelas II.

Pada bulan Oktober terdapat mutasi Panitera Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I.B Dra. Azizah Triningsih, SH menjadi Panitera Pengadilan Agama Temanggung Kelas I.B. dan digantikan oleh Muh Amin, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Magelang Kelas II menjadi Panitera Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I.B. Selain itu terdapat penggantian Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I.B. Arifah S. Maspeke, S.Ag., MH yang di promosikan menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Semarang Kelas I.A. dan digantikan oleh Muh. Akbar Ariz Purnomo , S.H.. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Temanggung Kelas I.B. menjadi Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I.B. Serta mutasi Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I.B HANDAYANI, S.H. menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Salatiga Kelas I.B.

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan jumlah aparatur Pengadilan Agama Ambarawa sampai akhir 2021 sebanyak 23 orang, dengan rincian sebagai berikut: jumlah hakim sebanyak 5 orang, jumlah kepaniteraan sebanyak 13 orang, jumlah kesekretariatan sebanyak 5 orang. Jumlah tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara SDM yang tersedia dengan beban kerja yang cukup besar dengan volume jumlah perkara yang meningkat, maka dalam rangka memaksimalkan pengelolaan/manajerial aparatur Pengadilan Agama dengan sebaik-baiknya, maka kebijakan dengan rangkap jabatan yang tidak dapat dihindari.

---

## 2. MANAJEMEN PERKARA

Administrasi Peradilan dapat berjalan lancar, cepat serta tepat, dengan adanya peralatan teknologi sebagai sarana proses administrasi dengan mengefektifkan dan meningkatkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI yang mengacu kepada sistem kerja pola Bindalmin yang mempunyai keunggulan, diantaranya :

- ) mempercepat pelayanan;
- ) mudah pencarian data;
- ) terintegrasi dan otomatisasi;
- ) efisiensi dan efektivitas dalam penyimpanan data perkara.

---

### 3. PELAYANAN INFORMASI

- a. Terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SKIVIII/2007 tahun 2007 dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011.
- b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan ditingkatkan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, meliputi pelayanan:
  - ) Pembukaan Website Pengadilan Agama Ambarawa, menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik melalui Website Pengadilan Agama Ambarawa [www.pa-ambarawa.go.id](http://www.pa-ambarawa.go.id) dan email : sekretariat@pa-ambarawa.go.id dan pa\_ambarawa20@yahoo.co.id.
  - ) keterbukaan dibidang anggaran, informasi tentang panjar biaya perkara, penerimaan uang iwadl.
  - ) Informasi jadwal sidang
  - ) Informasi perkara yang meliputi tentang Informasi jadwal sidang, pengumuman ghoib, perkara yang masih dalam proses, diputus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan di minutasi.
- c. Pelayanan informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi perlu disediakan sarana prasarana yang memadai, berupa :
  - ) Penyediaan peralatan komputer
  - ) Penyediaan anggaran operasional
  - ) Penyediaan petugas operator TIM TI
  - ) Pelatihan petugas operator TIM TI
  - ) Penunjukan TIM TI
  - ) Menyediakan 1 unit komputer bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi peradilan berupa Touch Screen (layar sentuh)

---

### 4. MANAJEMEN ADMINISTRASI UMUM

- a. Meningkatnya kinerja pelayan publik, terhadap masyarakat pencari keadilan dan membudayakan sikap dan perilaku yang sopan, ramah, dan bijaksana untuk mewujudkan pelayanan prima.

- b. Meningkatnya disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
- c. Melalui Sistem Informasi Kepegawaian dengan singkatan (SIKEP) Mahkamah Agung RI, data kepegawaian dapat di akomodasi dengan baik dan cepat dan setiap ada perubahan dalam hal kepangkatan dan lain-lain akan disesuaikan dengan data masing-masing pegawai.

---

## 5. MANAJEMEN KEUANGAN

Peradilan Agama adalah salah satu peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, dan dengan Sistem Keuangan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), telah merealisasikan kebutuhan operasional Peradilan Agama yang nilainya semakin meningkat. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, sehingga anggaran yang tersedia tepat sasaran dan tepat guna serta dapat dipertanggung jawabkan.

---

## 6. PENGAWASAN

Untuk mengefektifkan pengawasan, maka para Hakim diberi tugas tambahan sebagai Hakim Pengawas Bidang dan Wakil Ketua sebagai Koordinator dan penanggung jawab pengawasan. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa dengan melaksanakan pengawasan setiap bulan, membina dan menindak lanjuti hasil-hasil temuan dari Hakim Pengawas Bidang yang dilaporkan setiap tiga bulan sekali kepada Ketua melalui Wakil Ketua sebagai koordinator.

Dengan adanya pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang yang efektif dibawah koordinator Wakil Ketua Pengadilan Agama diharapkan petugas dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

## B. VISI DAN MISI

---

### 1. VISI

***"Terwujudnya Pengadilan Agama Ambarawa yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung".***

Makna Profesional adalah seluruh aparatur Peradilan Agama Untuk mencapai sukses dalam bekerja, harus mampu bersikap profesional. Profesional tidak hanya berarti ahli saja. Namun selain memiliki keahlian juga harus bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya tersebut. Seorang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu, seorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi serta mengembangkan

kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya.

Mandiri dalam hal ini berarti seluruh aparat peradilan agama tidak bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dihadapi untuk diselesaikan.

---

## 2. MISI

Visi yang telah dirumuskan oleh Pengadilan Agama Ambarawa sebagaimana tertulis pada Sub Bab sebelumnya, maka oleh karena itu Pengadilan Agama Ambarawa berkewajiban untuk mewujudkan pencapaiannya, demikian pula halnya dengan misi, sehingga Pengadilan Agama Ambarawa hanya tinggal menjalankan misi. Dengan demikian dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Ambarawa tidak keluar dari pernyataan misi tersebut di atas.

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pencari keadilan, bebas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Ambarawa seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Ambarawa berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- e. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

## BAB II

### PENYELESAIAN PERKARA

#### A. KEADAAN PERKARA

Jumlah sisa perkara pada Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2020 adalah sebanyak 23 perkara, dari sisa perkara tahun 2020 tersebut jumlah perkara yang diputus pada tahun 2021 sebanyak 23 maka sisa perkara 2020 yang belum diputus pada tahun 2019 sebanyak 0 perkara.

#### B. PENYELESAIAN PERKARA

##### 1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sisa perkara merupakan tunggakan perkara tahun sebelumnya yang belum diputus pada tahun 2021. Dari 23 sisa perkara yang diputus/diselesaikan pada tahun 2021, dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Bulan	Keadaan Perkara		
		Sisa Bulan Lalu	Diputus	Sisa Bulan Ini
1	Januari	23	11	12
2	Februari	12	6	6
3	Maret	6	4	2
4	April	2		2
5	Mei	2	1	1
6	Juni	1		1
7	Juli	1	1	-
8	Agustus	-		-
9	September	-		-
10	Oktober	-		-
11	November	-		-
12	Desember	-		-



## 2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Perkara yang diputus tepat waktu adalah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021 dan dapat diselesaikan pada tahun yang sama.

### KEADAAN PERKARA

Jumlah perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2021 sebanyak 2.837 perkara, sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2021 sebanyak 2.720 maka sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2021 sebanyak 140 perkara.

### PENYELESAIAN PERKARA

Perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Ambarawa selama tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1) Sisa Tahun 2020	=	23 perkara
2) Diterima tahun 2021	=	2.837 perkara
3) Jumlah	=	2.860 perkara
4) Diputus	=	2.720 perkara
5) Sisa	=	140 perkara

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

Dari Jumlah perkara yang diputus/diselesaikan Pengadilan Ambarawa pada tahun 2021 sebanyak 2.720 perkara, yang merupakan perkara perceraian dan yang telah diterbitkan Akta Cerainya sebanyak 1.894 perkara.

Faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2021 dikelompokkan sebagai berikut :

1) Poligami tidak sehat	=	10 perkara
2) Krisis Akhlak	=	15 perkara
3) Cemburu	=	- perkara
4) Kawin Paksa	=	4 perkara
5) Ekonomi	=	381 perkara
6) Tidak ada tanggung Jawab/Meninggalkan Salah satu pihak	=	95 perkara
7) Kekerasan Dalam Rumah Tangga	=	23 perkara
8) Penganiayaan /kekejaman mental	=	- perkara
9) Dihukum	=	3 perkara
10) Cacat Biologis	=	2 perkara
11) Murtad	=	7 perkara
12) Zina	=	5 perkara
13) Tidak ada Keharmonisan	=	1.349 perkara
14) Lain – lain	=	8 perkara

---

#### PERKARA KHUSUS YANG MENYANGKUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2021 perkara yang salah satu pihaknya atau keduanya PNS sebanyak 33 perkara dapat dirinci sebagai berikut :

1) Cerai talak	=	9 perkara
2) Cerai gugat	=	24 perkara
3) Ijin Poligami	=	- perkara

dari 31 perkara tersebut, terdiri dari :

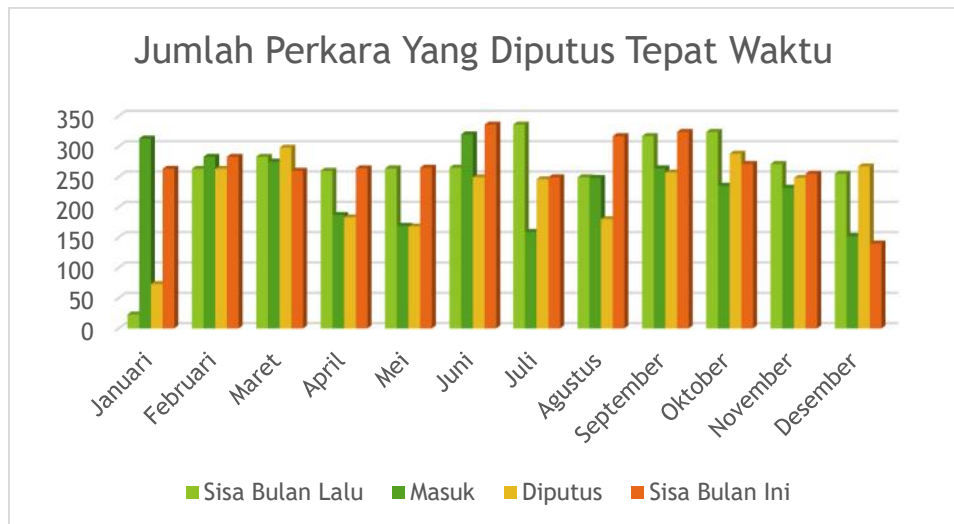
1) Masih dalam proses	=	4 perkara
2) Selesai	=	29 perkara
3) Dicabut	=	- perkara

---

#### STATISTIK PERKARA YANG DISIDANGKAN DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Data perkara tingkat pertama yg ditangani oleh pada Pengadilan Agama Ambarawa untuk kurun waktu tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Keadaan Perkara				
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Diputus	Sisa Bulan Ini
1	Januari	23	313	336	73	263
2	Februari	263	283	546	263	283
3	Maret	283	275	558	298	260
4	April	260	187	447	183	264
5	Mei	264	169	433	168	265
6	Juni	265	320	585	249	336
7	Juli	336	159	495	246	249
8	Agustus	249	248	497	180	317
9	September	317	264	581	257	324
10	Oktober	324	235	559	288	271
11	November	271	232	503	248	255
12	Desember	255	152	407	267	140
<b>TOTAL</b>			2.837		2.720	



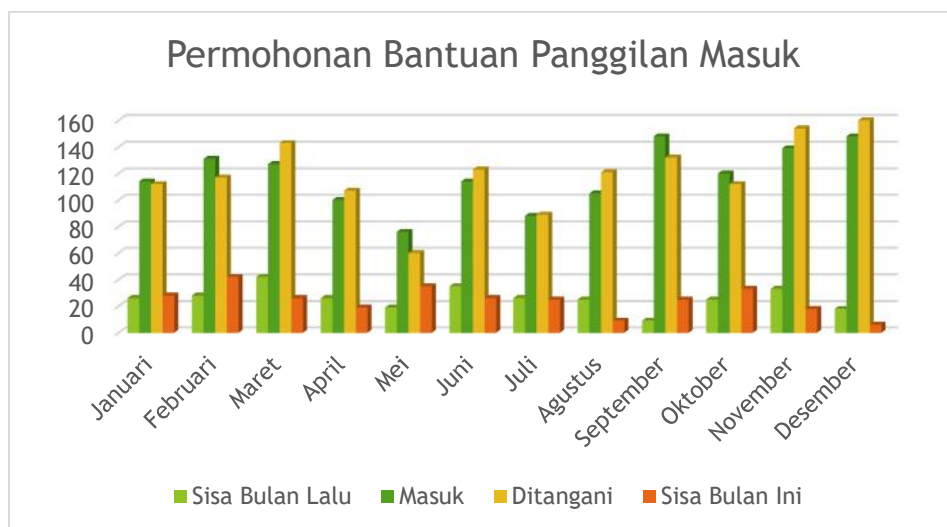
### PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN

Pemohonan Bantuan Panggilan (Tabayyun) merupakan penyelesaian perkara dimana salah satu pihak yang berperkara berdomisili diluar wilayah kerja Pengadilan Agama yang menangani perkara dengan melibatkan Pengadilan Agama lain sesuai dengan domisili para pihak tersebut. Selama tahun 2021 Pengadilan Agama Ambarawa menangani permohonan bantuan panggilan sebanyak 2.526 perkara dimana untuk permohonan bantuan panggilan masuk sebanyak 1.410 perkara dan permohonan bantuan panggilan keluar sebanyak 1.116 perkara, dengan perincian sebagai berikut :

PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN MASUK

Data permohonan bantuan panggilan masuk pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Keadaan Perkara				Sisa Bulan Ini
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Ditangani	
1	Januari	26	114	140	112	28
2	Februari	28	131	159	117	42
3	Maret	42	127	169	143	26
4	April	26	100	126	107	19
5	Mei	19	76	95	60	35
6	Juni	35	114	149	123	26
7	Juli	26	88	114	89	25
8	Agustus	25	105	130	121	9
9	September	9	148	157	132	25
10	Oktober	25	120	145	112	33
11	November	33	139	172	154	18
12	Desember	18	148	166	160	6
<b>TOTAL</b>			1.410		1.430	



### PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN KELUAR

Data permohonan bantuan panggilan keluar pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Keadaan Perkara				
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Ditangani	Sisa Bulan Ini
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-
3	Maret	-	129	129	129	-
4	April	-	132	132	132	-
5	Mei	-	95	95	95	-
6	Juni	-	85	85	85	-
7	Juli	-	119	119	119	-
8	Agustus	-	45	45	45	-
9	September	-	127	127	127	-
10	Oktober	-	152	152	152	-
11	November	-	114	114	114	-
12	Desember	-	29	29	29	-
<b>TOTAL</b>			1.027		1.027	



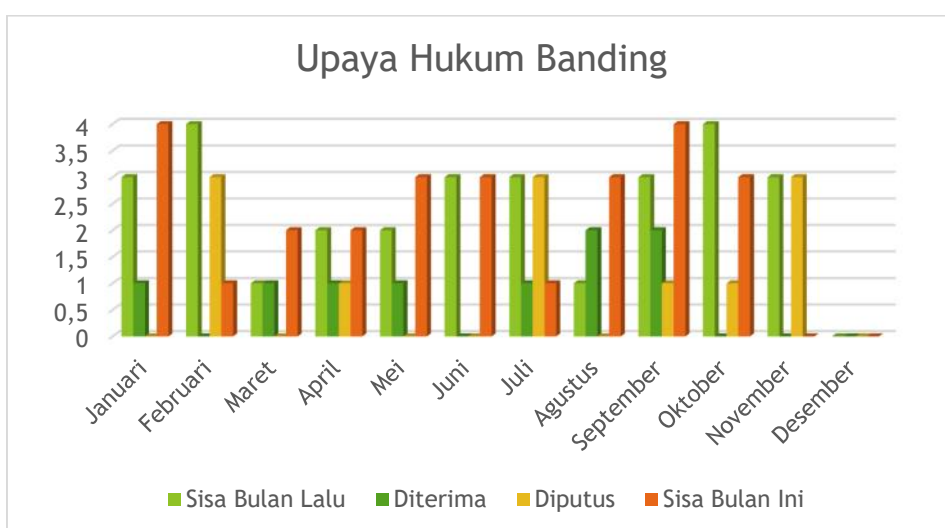
### 3. JUMLAH PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

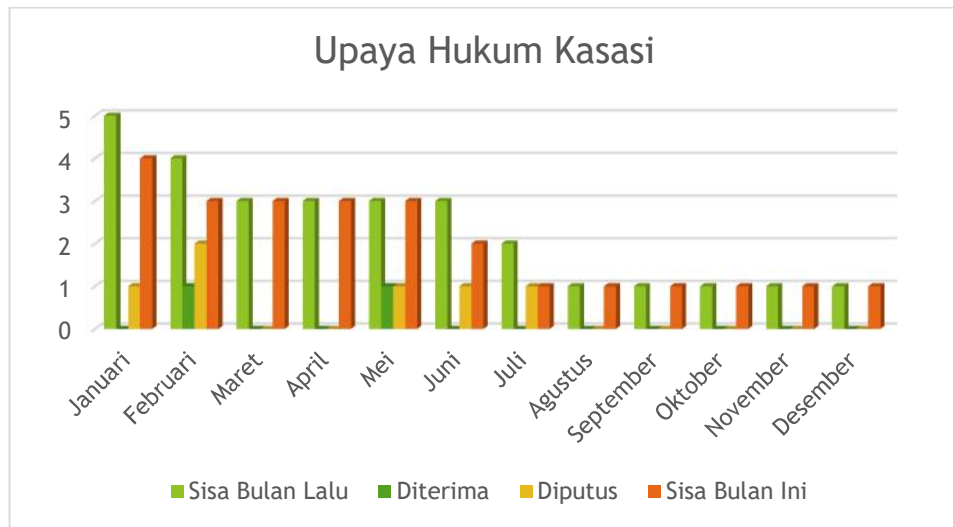
Data perkara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebanyak 9 perkara yang terdiri dari 0 perkara tahun 2020 dan 9 perkara baru tahun 2021. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus sebanyak 9 perkara sehingga sisa perkara Banding tahun 2021 sebanyak 0 perkara. Adapun data perkara yang dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebanyak 4 perkara yang terdiri dari 2 perkara tahun 2019 dan 2 perkara baru tahun 2020. Dari jumlah

tersebut perkara yang diputus sebanyak 3 perkara sehingga sisa perkara Kasasi tahun 2021 sebanyak 1 perkara.

Data perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebanyak 0 perkara yang terdiri dari 2 perkara tahun 2018 dan 0 perkara baru tahun 2019. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus sebanyak 0 perkara sehingga sisa perkara Peninjauan Kembali tahun 2019 sebanyak 2 perkara.

No.	Bulan	Sisa Bulan Lalu			Diterima			Diputus			Sisa Bulan Ini		
		B	K	PK	B	K	PK	B	K	PK	B	K	PK
1	Januari	3	5	-	1	-	-	-	1	-	4	4	-
2	Februari	4	4	-	-	1	-	3	2	-	1	3	-
3	Maret	1	3	-	1	-	-	-	-	-	2	3	-
4	April	2	3	-	1	-	-	1	-	-	2	3	-
5	Mei	2	3	-	1	1	-	-	1	-	3	3	-
6	Juni	3	3	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-
7	Juli	3	2	-	1	-	-	3	1	-	1	1	-
8	Agustus	1	1	-	2	-	-	-	-	-	3	1	-
9	September	3	1	-	2	-	-	1	-	-	4	1	-
10	Oktober	4	1	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-
11	November	3	1	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-
12	Desember	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>TOTAL</b>					9	2	-	12	6	-			



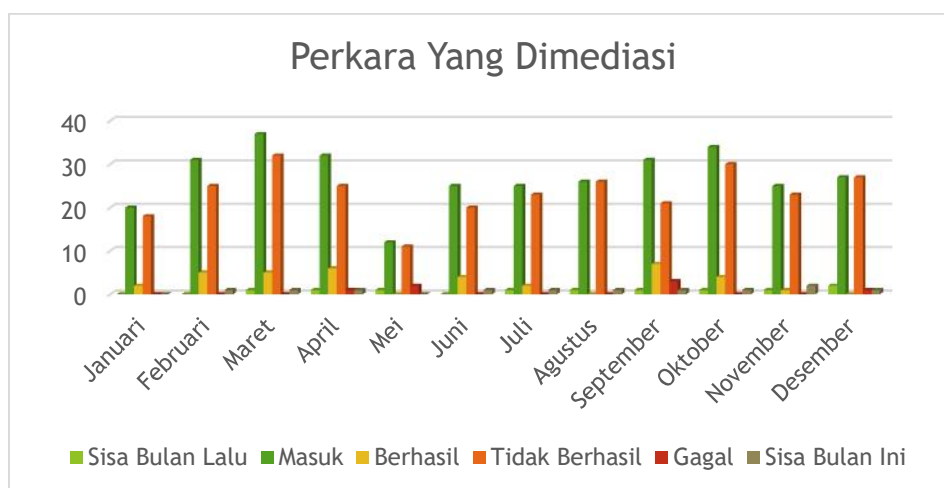


#### 4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI

Data perkara yang dilakukan proses mediasi pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebanyak 325 perkara. Dari jumlah tersebut perkara yang berhasil di Mediasi sebanyak 36 perkara sehingga perkara yang tidak berhasil dilakukan Mediasi di tahun 2021 sebanyak 281 perkara dengan perincian sebagai berikut :

## Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2021

No.	Bulan	Perkara Yang Dimediasi					Sisa Bulan Ini
		Sisa Perkara	Masuk	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal	
1	Januari	-	20	2	18	-	-
2	Februari	-	31	5	25	-	1
3	Maret	1	37	5	32	-	1
4	April	1	32	6	25	1	1
5	Mei	1	12	-	11	2	-
6	Juni	-	25	4	20	-	1
7	Juli	1	25	2	23	-	1
8	Agustus	1	26	-	26	-	1
9	September	1	31	7	21	3	1
10	Oktober	1	34	4	30	-	1
11	November	1	25	1	23	-	2
12	Desember	2	27	-	27	1	1
<b>TOTAL</b>			325	36	281	7	



### 5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Pada Pengadilan Agama Ambarawa tidak terdapat perkara anak yang berhasil melalui diversi yang ditangani.

### C. PERKARA BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

Sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang kemudian dirincikan di Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

#### POSBAKUM

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Ambarawa mendapatkan alokasi anggaran Posbakum sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jumlah Jam Layanan sebesar 600 Jam Layanan dan target perkara yang ditangani sebesar 1.165

Perkara. Dari alokasi anggaran dan target tersebut dapat diserap anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah jam layanan tercapai sebesar 600 jam layanan dan perkara yang dilayani sebanyak 1.165 Perkara dari 600 Layanan yang diberikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bulan	s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	Total	Jumlah Layanan	Jumlah Perkara
1	Januari	-	2.626.800	2.626.800	138	138
2	Februari	2.626.800	2.626.800	5.253.600	98	98
3	Maret	5.253.600	2.985.000	8.238.600	116	116
4	April	8.238.600	2.835.750	11.074.350	91	91
5	Mei	11.074.350	2.447.700	13.522.050	81	81
6	Juni	13.522.050	2.835.750	16.357.800	154	154
7	Juli	16.357.800	2.447.700	18.805.500	66	66
8	Agustus	18.805.500	2.626.800	21.432.300	103	103
9	September	21.432.300	2.985.000	24.417.300	115	115
10	Oktober	-	2.597.700	2.597.700	99	99
11	November	2.597.700	2.985.000	5.582.700	104	104
12	Desember	5.582.700	-	5.582.700	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>30.000.000</b>		<b>1.165</b>	<b>1.165</b>

#### PERKARA PRODEO

Perkara prodeo menurut Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014 adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Program ini merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung RI dalam menunjang pelaksanaan Indikator Utama yang dalam pelaksanaannya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sebagaimana tahun sebelumnya, Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran perkara Prodeo untuk 10 perkara dengan pagu anggaran per perkara sebesar Rp. 350.000,- dimana pada tahun 2021 dapat terserap sepenuhnya sebanyak 10 perkara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bulan	Realisasi Anggaran			Jumlah Perkara
		s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	Total	
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	700.000	700.000	2
4	April	700.000	700.000	1.400.000	2
5	Mei	1.400.000	350.000	1.750.000	1
6	Juni	1.750.000	1.750.000	3.500.000	5
7	Juli	3.500.000	-	3.500.000	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>3.500.000</b>		<b>10</b>

## BAB III

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### A. SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa berjumlah 33 orang yang terdiri dari 23 PNS/Hakim dan 10 orang tenaga honorer, adapun lebih detilnya disajikan dalam data sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Ishak Lubis, S.Ag	Ketua	
2.	Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy., M.Sy.	Wakil Ketua	
3.	Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.	Hakim	
4.	Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.	Hakim	
5.	Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.	Hakim	
6.	Muh Amin, S.H., M.H.	Panitera	
7.	Fenia Ariasti, S.E., M.H.	Sekretaris	
8.	Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H.	Panitera Muda Gugatan	
9.	Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy.	Panitera Muda Permohonan	
10.	Dra. Widad	Panitera Muda Hukum	
11.	Heri Sulistiono, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
12.	Martasaputra Ardhy Ristiano Utomo, S.Kom., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
13.	Nur Arifah Kadir, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
14.	Nailatussa'adah, S.H.	Panitera Pengganti	
15.	Ambar Setiawati, S.H.I.	Panitera Pengganti	
16.	Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H.	Panitera Pengganti	
17.	Ahmad Roikan, S.Sy. SH	Panitera Pengganti	
18.	Sukarna, S.H.I.	Panitera Pengganti	
19.	Adnani	Juru Sita Pengganti	
20.	Sabar Budi Santosa	Juru Sita Pengganti	
21.	Dicka Martyastanti, S.Psi.	Analisis SDM Aparatur	
22.	Mutiara Candra Dewi, S.H.	CPNS	
23.	Irvan Yulianto, A.Md	CPNS	

Kebutuhan sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Ambarawa di tahun anggaran 2021 jika dilihat dari rasio perbandingan porsi pegawai yang ada, maka akan terlihat terdapat ketimpangan antara jumlah pegawai pada setiap bagian. Jika dilihat dari rasio jumlah perkara yang ditangani sebanyak sekitar 2.837 perkara berbanding dengan jumlah majelis hakim sebanyak 5 orang maka rata-rata setiap hakim yang menjadi ketua majelis harus menangani perkara sebanyak 567 setiap tahun atau 3 perkara per hari.

Untuk bagian kepaniteraan, pada tahun 2021 terjadi penambahan wilayah yurisdiksi sebanyak 9 kecamatan yang sebelumnya berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa. Sehingga saat ini wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa sebanyak 19 Kecamatan. Jika dilihat dari jumlah personel yang ada bisa dikatakan sangat kurang memadai. Sedangkan bagian sekretariat masih terdapat kekurangan personil staf pada setiap sub bagian terutama pada sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan serta sub bagian Umum dan Keuangan.

## 1. MUTASI

Data mutasi Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa untuk tahun 2021 terbagi menjadi Mutasi Masuk dan Mutasi keluar dengan penjelasan detil sebagai berikut:

### MUTASI MASUK

Data Mutasi Masuk Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	SATKER ASAL	TMT
1.	Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.	Hakim	Hakim	PA Kota Madiun	26/02/2021
2.	Nailatuss'adah, S.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti	PA Demak	17/06/2021
3.	Handayani, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Panitera Muda Permohonan	PA Salatiga	28/06/2021
4.	Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy., M.Sy.	Ketua	Wakil Ketua	PA Muara Labuh	02/08/2021
5.	Muh Amin, S.H., M.H.	Panitera	Panitera	PA Magelang	22/10/2021
6.	Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H..	Panitera Pengganti	Panitera Muda Gugatan	PA Temanggung	22/10/2021

### MUTASI KELUAR

Data Mutasi Keluar Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	SATKER TUJUAN	TMT
1.	Dra. Azizah Triningsih, SH	Panitera	Panitera	PA Temanggung	19/10/2021
2.	Drs. H. Musthofa Kamal, MH	Ketua	Wakil Ketua	PA Indramayu	29/07/2021
3.	Mohammad Adib Fajrudin, S.Ag.	Panitera Muda Permohonan	Panitera Muda Permohonan	PA Demak	28/06/2021
4.	Handayani, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Panitera Pengganti	PA Salatiga	11/10/2021
5.	Arifah S. Maspeke, S.Ag., MH	Panitera Muda Gugatan	Panitera Muda Hukum	PA Semarang	18/10/2021
6.	M Nur Hasan Latief, SHI.,SH.,MM.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti	PA Sragen	16/6/2021

### 2. PROMOSI

Data promosi Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS PROMOSI	TMT	KETERANGAN
1.	Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy.	Pengangkatan Panitera Muda Permohonan	02/11/2021	
2.	Ishak Lubis, S.Ag	Pengangkatan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa	28/07/2021	
3.	Drs. H. Musthofa Kamal, MH	Kenaikan Kelas Pengadilan I.A	29/07/2021	

### 3. PENSIUN

Data Pensiun Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TMT	Keterangan
1.			--- NIHIL ---	

4. DIKLAT SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT

Data Diklat baik SDM Teknis maupun Non Teknis Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa yang telah mengikuti diklat untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NAMA DIKLAT	Keterangan
1.	Irvan Yulianto, A.Md	Diklat Pelatihan Dasar CPNS	
2.	Nailatussa'adah, S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Penitera/ Panitera Pengganti	
3	Ambar Setiawati, S.H.I.	Pelatihan Teknis Yudisial Penitera/ Panitera Pengganti	
4	Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Penitera/ Panitera Pengganti	
5	Sukarna, S.H.I.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	
6	Ishak Lubis, S.Ag	Diklat Penyetaraan Ekonomi Syariah	

## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TENOLOGI INFORMASI

#### A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan bidang keuangan Pengadilan Agama Ambarawa telah menetapkan perencanaan pembelanjaan untuk menuju pencapaian target penyerapan anggaran yang maksimal. Pengelolaan keuangan DIPA Pengadilan Agama Ambarawa terbagi menjadi 3 (tiga) buah program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI serta Program Peningkatan Manajemen Peradilan. Selain 3 (tiga) program diatas, Pengadilan Agama Ambarawa juga terus berupaya memaksimalkan rencana pencapaian realisasi penerimaan anggaran melalui PNBPN.

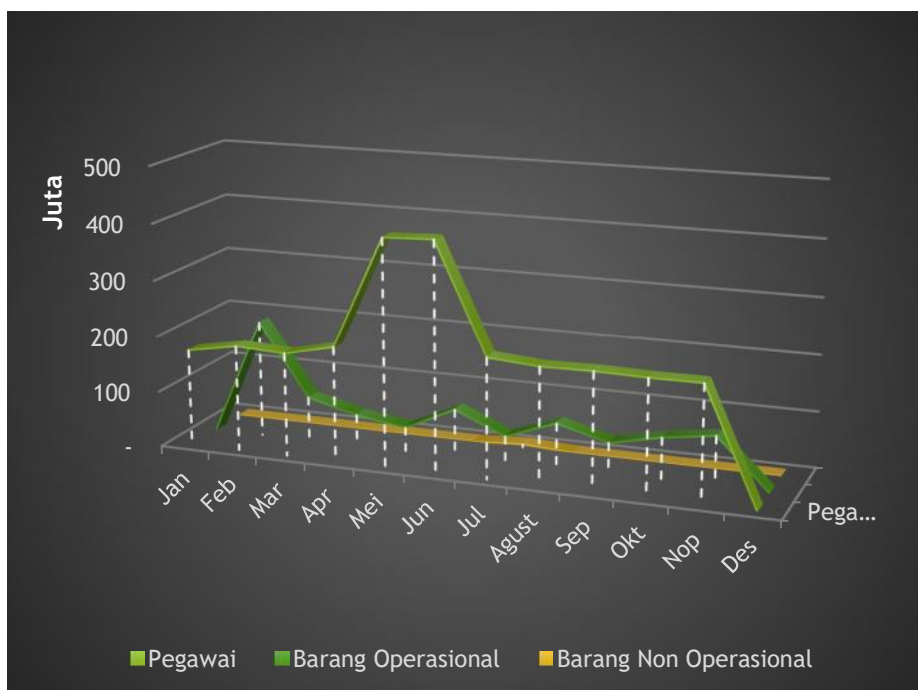
#### 1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI terbagi menjadi 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang Operasional dan Belanja Barang Non Operasional. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Ambarawa mendapatkan alokasi PAGU anggaran untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 3.908.906.000,- dimana pada akhir tahun 2021 ini berhasil terserap sebesar Rp. 3.798.451.629,- atau sebanyak 97,17% Adapun rincian dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

BULAN	URAIAN	BELANJA			TOTAL DIPA
		PEGAWAI	BARANG OPERASIONAL	BARANG NON OPERASIONAL	
JANUARI	Anggaran 2021	2.908.749.000	975.157.000	5.000.000	3.888.906.000
	Realisasi	172.252.431	0	0	172.252.431
	Sisa	2.736.496.569	975.157.000	5.000.000	3.716.653.569
	Prosentase	5,92%	0,00%	0,00%	4,43%
FEBRUARI	Anggaran 2021	2.736.496.569	975.157.000	5.000.000	3.716.653.569
	Realisasi	187.869.072	208.003.242	0	395.872.314
	Sisa	2.548.627.497	767.153.758	5.000.000	3.320.781.255
	Prosentase	12,38%	21,33%	0,00%	14,61%

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2021

<b>MARET</b>	Anggaran 2021	2.548.627.497	767.153.758	5.000.000	3.320.781.255
	Realisasi	183.945.152	78.884.116	0	262.829.268
	Sisa	2.364.682.345	688.269.642	5.000.000	3.057.951.987
	Prosentase	18,70%	29,42%	0,00%	21,37%
<b>APRIL</b>	Anggaran 2021	2.364.682.345	688.269.642	5.000.000	3.057.951.987
	Realisasi	203.931.360	56.093.000	0	260.024.360
	Sisa	2.160.750.985	632.176.642	5.000.000	2.797.927.627
	Prosentase	25,72%	35,17%	0,00%	28,05%
<b>MEI</b>	Anggaran 2021	2.160.750.985	632.176.642	5.000.000	2.797.927.627
	Realisasi	401.152.337	43.202.852	0	444.355.189
	Sisa	1.759.598.648	588.973.790	5.000.000	2.353.572.438
	Prosentase	39,51%	39,60%	0,00%	39,48%
<b>JUNI</b>	Anggaran 2021	1.759.598.648	588.973.790	5.000.000	2.353.572.438
	Realisasi	404.804.206	85.468.211	0	490.272.417
	Sisa	1.354.794.442	503.505.579	5.000.000	1.863.300.021
	Prosentase	53,42%	48,37%	0,00%	52,09%
<b>JULI</b>	Anggaran 2021	1.354.794.442	503.505.579	5.000.000	1.863.300.021
	Realisasi	211.999.931	47.497.505	4.930.000	264.427.436
	Sisa	1.142.794.511	456.008.074	70.000	1.598.872.585
	Prosentase	60,71%	53,24%	98,60%	58,89%
<b>AGUSTUS</b>	Anggaran 2021	1.142.794.511	456.008.074	70.000	1.598.872.585
	Realisasi	205.313.161	80.568.805	0	285.881.966
	Sisa	937.481.350	375.439.269	70.000	1.312.990.619
	Prosentase	67,77%	61,50%	98,60%	66,24%
<b>SEPTEMBER</b>	Anggaran 2021	937.481.350	375.439.269	70.000	1.312.990.619
	Realisasi	206.450.187	56.344.476	0	262.794.663
	Sisa	731.031.163	319.094.793	70.000	1.050.195.956
	Prosentase	74,87%	67,28%	98,60%	73,00%
<b>OKTOBER</b>	Anggaran 2021	731.031.163	344.094.793	70.000	1.075.195.956
	Realisasi	204.516.077	75.756.051	0	280.272.128
	Sisa	526.515.086	268.338.742	70.000	794.923.828
	Prosentase	81,90%	73,17%	98,60%	79,69%
<b>NOVEMBER</b>	Anggaran 2021	526.515.086	268.338.742	70.000	794.923.828
	Realisasi	204.651.987	88.852.633	0	293.504.620
	Sisa	321.863.099	179.486.109	70.000	501.419.208
	Prosentase	88,93%	82,05%	98,60%	87,19%
<b>DESEMBER</b>	Anggaran 2021	321.863.099	179.486.109	70.000	501.419.208
	Realisasi	214.536.325	176.358.512	0	390.894.837
	Sisa	107.326.774	3.127.597	70.000	110.524.371
	Prosentase	96,31%	99,69%	98,60%	97,18%



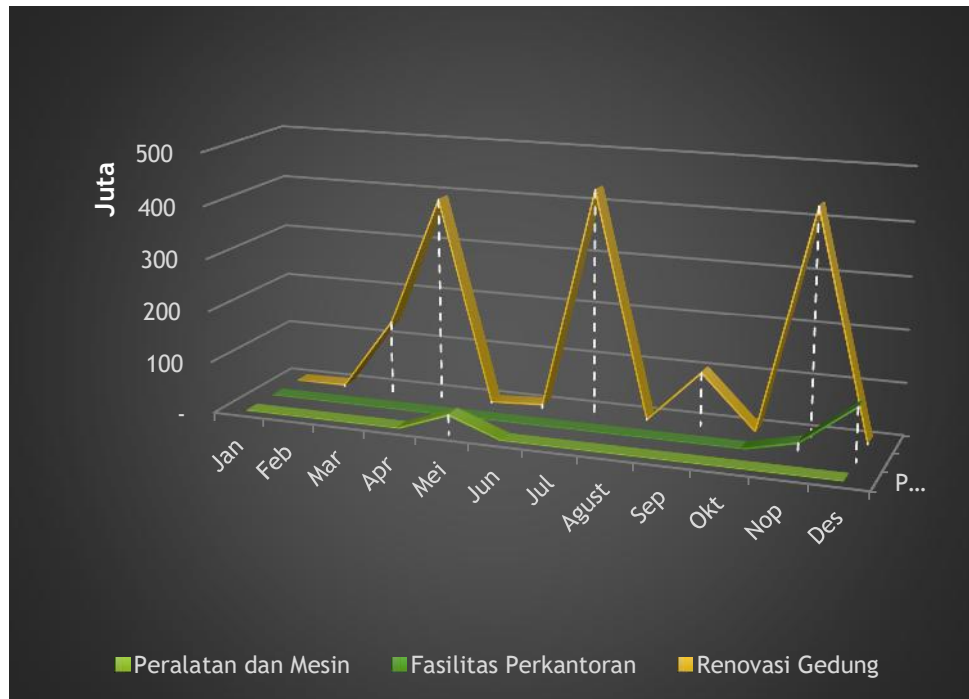
## 2. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI merupakan program pendukung yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan aparatur Mahkamah Agung RI kepada masyarakat. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Ambarawa mendapatkan alokasi PAGU anggaran untuk program Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 1.676.400.000,- dimana pada akhir tahun 2021 ini berhasil terserap sebesar Rp. 1.668.683.300,- atau sebanyak 99,54 %. Untuk tahun 2021, program ini terbagi menjadi 3 (tiga) jenis belanja modal yaitu Belanja Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Perangkat Fasilitas Perkantoran dan Renovasi Gedung dan Bangunan. Adapun rincian pelaksanaan program ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

BULAN	URAIAN	BELANJA			TOTAL DIPA
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Perangkat Fasilitas Perkantoran	Renovasi Gedung dan Bangunan	
JANUARI	Anggaran 2021	37.500.000	0	1.638.900.000	1.676.400.000
	Realisasi	0	0	0	0
	Sisa	37.500.000	0	1.638.900.000	1.676.400.000
	Prosentase	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FEBRUARI	Anggaran 2021	37.500.000	0	1.638.900.000	1.676.400.000
	Realisasi	0	0	1.864.900	1.864.900
	Sisa	37.500.000	0	1.637.035.100	1.674.535.100

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2021

	Prosentase	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
<b>MARET</b>	Anggaran 2021	37.500.000	0	1.637.035.100	1.674.535.100
	Realisasi	0	0	140.045.500	140.045.500
	Sisa	37.500.000	0	1.496.989.600	1.534.489.600
	Prosentase	0,00%	0,00%	8,66%	8,47%
<b>APRIL</b>	Anggaran 2021	37.500.000	0	1.496.989.600	1.534.489.600
	Realisasi	0	0	391.451.500	391.451.500
	Sisa	37.500.000	0	1.105.538.100	1.143.038.100
	Prosentase	0,00%	0,00%	32,54%	31,82%
<b>MEI</b>	Anggaran 2021	37.500.000	0	1.105.538.100	1.143.038.100
	Realisasi	37.497.900	0	740.000	38.237.900
	Sisa	2.100	0	1.104.798.100	1.104.800.200
	Prosentase	99,99%	0,00%	32,59%	34,10%
<b>JUNI</b>	Anggaran 2021	37.500.000	0	1.104.798.100	1.104.800.200
	Realisasi	37.497.900	0	6.478.000	6.478.000
	Sisa	2.100	0	1.098.320.100	1.098.322.200
	Prosentase	99,99%	0,00%	32,98%	34,48%
<b>JULI</b>	Anggaran 2021	37.500.000	0	1.098.320.100	1.098.322.200
	Realisasi	37.497.900	0	431.537.750	431.537.750
	Sisa	2.100	0	666.782.350	666.784.450
	Prosentase	99,99%	0,00%	59,32%	60,23%
<b>AGUSTUS</b>	Anggaran 2021	37.500.000	0	666.782.350	666.784.450
	Realisasi	37.497.900	0	115.000	115.000
	Sisa	2.100	0	666.667.350	666.669.450
	Prosentase	99,99%	0,00%	59,32%	60,23%
<b>SEPTEMBER</b>	Anggaran 2021	37.500.000	125.244.000	541.423.350	666.669.450
	Realisasi	37.497.900	0	102.021.000	102.021.000
	Sisa	2.100	125.244.000	439.402.350	564.648.450
	Prosentase	99,99%	0,00%	70,97%	66,32%
<b>OKTOBER</b>	Anggaran 2021	37.500.000	125.244.000	439.402.350	564.648.450
	Realisasi	37.497.900	0	0	0
	Sisa	2.100	125.244.000	439.402.350	564.648.450
	Prosentase	99,99%	0,00%	70,97%	66,32%
<b>NOVEMBER</b>	Anggaran 2021	37.500.000	125.244.000	439.402.350	564.648.450
	Realisasi	37.497.900	23.350.000	430.504.750	453.854.750
	Sisa	2.100	101.894.000	8.897.600	110.793.700
	Prosentase	99,99%	18,64%	99,41%	93,39%
<b>DESEMBER</b>	Anggaran 2021	37.500.000	101.894.000	8.897.600	110.793.700
	Realisasi	37.497.900	101.597.000	1.480.000	103.077.000
	Sisa	2.100	297.000	7.417.600	7.716.700
	Prosentase	99,99%	99,76%	99,51%	99,54%



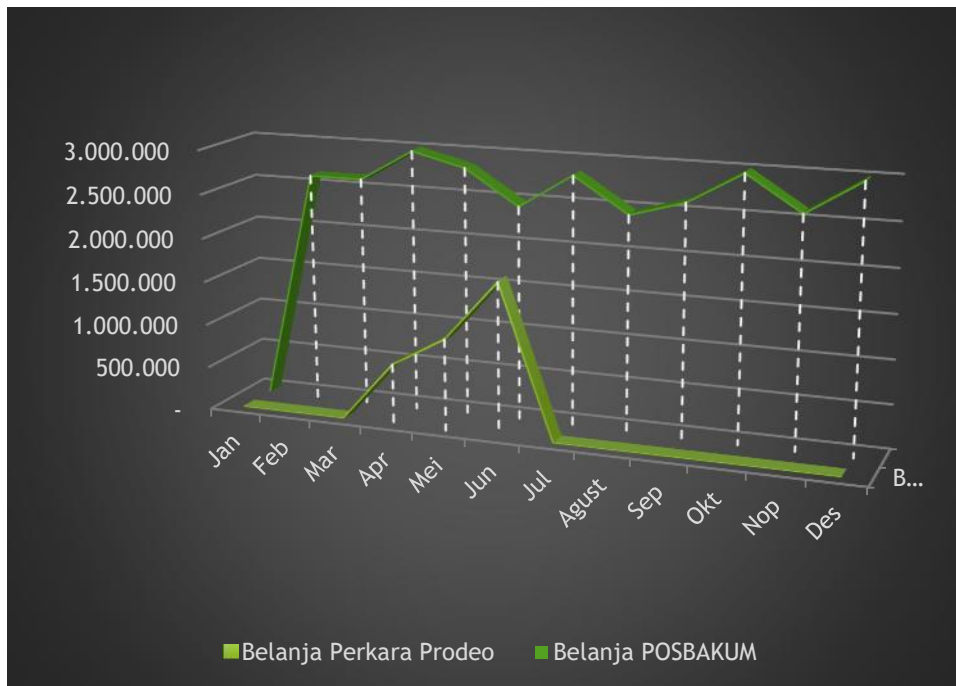
### 3. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN

Berbeda dengan kedua program yang sudah dijabarkan diatas dimana tanggung jawab vertikal disampaikan kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, program peningkatan manajemen peradilan merupakan program yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Ambarawa mendapatkan alokasi PAGU anggaran untuk program peningkatan manajemen Peradilan sebesar Rp. 33.500.000,- dimana pada akhir tahun 2021 ini berhasil terserap sebesar Rp. 33.500.000,- atau sebanyak 100 %. Program ini diberikan sebagai bentuk pelayanan langsung yang berkaitan dengan masyarakat. Penjabaran dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

BULAN	URAIAN	BELANJA PERKARA PRODEO	BELANJA POSBAKUM	TOTAL DIPA
<b>JANUARI</b>	Anggaran 2021	3.500.000	30.000.000	33.500.000
	Realisasi	0	0	0
	Sisa	3.500.000	30.000.000	33.500.000
	Prosentase	0,00%	0,00%	0,00%
<b>FEBRUARI</b>	Anggaran 2021	3.500.000	30.000.000	33.500.000
	Realisasi	0	2.626.800	2.626.800
	Sisa	3.500.000	27.373.200	30.873.200

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2021

	Prosentase	0,00%	8,76%	7,84%
<b>MARET</b>	Anggaran 2021	3.500.000	27.373.200	30.873.200
	Realisasi	0	2.626.800	2.626.800
	Sisa	3.500.000	24.746.400	28.246.400
	Prosentase	0,00%	17,51%	15,68%
<b>APRIL</b>	Anggaran 2021	3.500.000	24.746.400	28.246.400
	Realisasi	700.000	2.985.000	3.685.000
	Sisa	2.800.000	21.761.400	24.561.400
	Prosentase	20,00%	27,46%	26,68%
<b>MEI</b>	Anggaran 2021	2.800.000	21.761.400	24.561.400
	Realisasi	1.050.000	2.835.750	3.885.750
	Sisa	1.750.000	18.925.650	20.675.650
	Prosentase	50,00%	36,91%	38,28%
<b>JUNI</b>	Anggaran 2021	1.750.000	18.925.650	20.675.650
	Realisasi	1.750.000	2.447.700	4.197.700
	Sisa	0	16.477.950	16.477.950
	Prosentase	100,00%	45,07%	50,81%
<b>JULI</b>	Anggaran 2021	0	16.477.950	16.477.950
	Realisasi	0	2.835.750	2.835.750
	Sisa	0	13.642.200	13.642.200
	Prosentase	100,00%	54,53%	59,28%
<b>AGUSTUS</b>	Anggaran 2021	0	13.642.200	13.642.200
	Realisasi	0	2.447.700	2.447.700
	Sisa	0	11.194.500	11.194.500
	Prosentase	100,00%	62,69%	66,58%
<b>SEPTEMBER</b>	Anggaran 2021	0	11.194.500	11.194.500
	Realisasi	0	2.626.800	2.626.800
	Sisa	0	8.567.700	8.567.700
	Prosentase	100,00%	71,44%	74,42%
<b>OKTOBER</b>	Anggaran 2021	0	8.567.700	8.567.700
	Realisasi	0	2.985.000	2.985.000
	Sisa	0	5.582.700	5.582.700
	Prosentase	100,00%	81,39%	83,34%
<b>NOVEMBER</b>	Anggaran 2021	0	5.582.700	5.582.700
	Realisasi	0	2.597.700	2.597.700
	Sisa	0	2.985.000	2.985.000
	Prosentase	100,00%	90,05%	91,09%
<b>DESEMBER</b>	Anggaran 2021	0	2.985.000	2.985.000
	Realisasi	0	2.985.000	2.985.000
	Sisa	0	0	0
	Prosentase	100,00%	100,00%	100,00%



#### 4. REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Selain pencapaian penyerapan target penyerapan anggaran, Pengadilan Agama Ambarawa juga cukup berhasil dalam pencapaian rencana anggaran penerimaan negara melalui PNBP. Adapun realisasi dari PNBP Pengadilan Agama Ambarawa tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

BULAN	DIPA 01	DIPA 04	TOTAL PNBP
JANUARI	104.643	4.010.000	4.114.643
FEBRUARI	104.643	11.829.500	11.934.143
MARET	104.643	0	104.643
APRIL	104.643	1.260.000	1.364.643
MEI	104.643	2.020.000	2.124.643
JUNI	104.643	0	104.643
JULI	104.643	4.185.500	4.290.143
AGUSTUS	104.643	3.561.000	3.665.643
SEPTEMBER	104.643	0	104.643
OKTOBER	104.643	0	104.643
NOVEMBER	104.643	0	104.643
DESEMBER	104.643	0	104.643
JUMLAH	1.255.716	26.866.000	28.121.716

## 5. REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA 2021

Saldo awal keuangan perkara Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2021 adalah sebesar Rp. 65.599.500,- Selama tahun 2021 total penerimaan pemasukan keuangan perkara yang berasal dari Panjar Biaya Perkara, Biaya Eksekusi, Biaya Konsinyasi di Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebesar Rp. 2.118.182.000,-, adapun total pengeluaran yang terdiri dari biaya proses, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya pengiriman, materai dan lain-lain adalah sebesar Rp. 2.101.079.500,-, sehingga saldo akhir keuangan perkara Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2021 sebesar Rp. 82.702.000,- dengan perincian sebagai berikut:

BULAN	SALDO AWAL	PEMASUKAN	PENGELUARAN			SALDO AKHIR
			BIAYA	PSP	TOTAL	
JANUARI	65.599.500	232.300.000	124.692.000	10.188.000	134.880.000	163.019.500
FEBRUARI	163.019.500	206.136.000	160.489.000	68.053.500	228.542.500	140.613.000
MARET	140.613.000	204.567.000	171.995.000	38.393.000	210.388.000	134.792.000
APRIL	134.792.000	140.271.000	128.105.000	28.101.000	156.206.000	118.857.000
MEI	118.857.000	131.505.000	89.065.000	23.141.000	112.206.000	138.156.000
JUNI	138.156.000	228.570.000	173.455.000	31.201.000	204.656.000	162.070.000
JULI	162.070.000	116.753.000	124.813.000	37.282.000	162.095.000	116.728.000
AGUSTUS	116.728.000	200.685.000	127.005.000	29.885.000	156.890.000	160.523.000
SEPTEMBER	160.523.000	201.470.000	167.415.000	35.831.000	203.246.000	158.747.000
OKTOBER	158.747.000	172.640.000	154.910.000	34.190.000	189.100.000	142.287.000
NOVEMBER	142.287.000	168.875.000	139.335.000	34.675.000	174.010.000	137.152.000
DESEMBER	137.152.000	114.410.000	123.945.000	44.915.000	168.860.000	82.702.000
TOTAL		2.118.182.000	1.685.224.000	415.855.500	2.101.079.500	

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengertian sarana dan prasarana Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Ambarawa terdiri dari sarana perkantoran dan sarana teknologi informasi.

### 1. SARANA PERKANTORAN

Sarana perkantoran Pengadilan Agama Ambarawa selengkapnya dapat dilihat pada data sebagai berikut :

### KENDARAAN DINAS

Data kendaraan dinas yang terdapat pada Pengadilan Agama Ambarawa tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak berat	
I	Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota Innova	2006	1	-	-	
2.	Toyota Avanza	2018	1	-	-	
3.	Toyota Innova	2016	1			Pinjam Pakai Pemda
II	Kendaraan Roda 2					
1.	Honda Mega Pro	2005	1	-	-	
2.	Honda Supra	2007	1	-	-	
3.	Honda Supra	2007	1	-	-	

### GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR

Data rumah dinas yang terdapat pada Pengadilan Agama Ambarawa tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak berat	
I	<b>GEDUNG KANTOR</b>					
1.	Gedung Kantor	1	1	-	-	
2.	Mushola	1	1	-	-	
II	<b>RUMAH DINAS</b>					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-	
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-	
3.	Rumah Dinas Hakim	2	1	1	-	
4.	Rumah Dinas Panitera	1	1	-	-	
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1	1	-	-	

### SARANA DAN PRASARANA GEDUNG

Data Inventaris Kantor yang terdapat pada Pengadilan Agama Ambarawa tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak berat	
<b>I</b>	<b>RUANG KANTOR</b>					
1.	Ruang Ketua	1	1	-	-	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	1	-	-	
3.	Ruang Hakim	1	1	-	-	
4.	Ruang Panitera	1	1	-	-	
5.	Ruang Sekretaris	1	1	-	-	
6.	Ruang Kepaniteraan	1	1	-	-	
7.	Ruang Sekretariat	1	1	-	-	
8.	Ruang Panitera Pengganti	1	1	-	-	
9.	Ruang Jurusita/jurusita Pengganti	1	1	-	-	
10.	Ruang Pelayanan	1	1	-	-	
11.	Ruang Sidang Umum	3	3	-	-	
12.	Ruang Arsip	2	2	-	-	
13.	Ruang Tunggu	1	1	-	-	
14.	Ruang Mediasi	1	1	-	-	
15.	Ruang Bermain	1	1	-	-	
16.	Ruang Server	1	1	-	-	
17.	Ruang Perpustakaan	1	1	-	-	
18.	Ruang Aula	1	1	-	-	
19.	Ruang Media Center	1	1	-	-	
20.	Ruang Tunggu Pimpinan	1	1	-	-	
21.	Ruang Tunggu Terbuka dan Receptionist	1	1	-	-	
22.	Ruang Panel	1	1	-	-	
23.	Ruang Pantry	2	2	-	-	
<b>II</b>	<b>SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN</b>					
1.	PC Unit	50	33	-	17	
2.	Laptop	19	16	-	3	
3.	Note book	2	-	-	2	
4.	CPU	1	-	-	1	

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2021

5.	Monitor	1	1	-	-
6.	Printer	23	11	-	12
7.	Scanner	5	5	-	-
8.	Server	3	2	-	1
9.	Router	1	1	-	-
10.	Modem	2	-	-	2
11.	Rak Server	2	2	-	-
12.	Alat tenis Meja	1	1	-	-
13.	Pagar Permanen	2	2	-	-
14.	PABX	2	1	-	1
15.	AC Split	31	31	-	-
16.	Portable Air Conditioner	2	-	-	2
17.	Kipas Angin	8	-	-	8
18.	Kompor Gas	1	1	-	-
19.	Tabung Gas	1	1	-	-
20.	Rak piring Aluminium	1	1	-	-
21.	Televisi	4	3	-	1
22.	Tape Recorder	3	1	-	2
23.	Amplifier	2	-	-	2
24.	Loudspeaker	1	-	-	1
25.	Sound System	1	-	-	1
26.	Microphone	2	-	-	2
27.	Stabilisator	8	-	-	8
28.	Alat Hiasan	3	-	-	3
29.	Lambang Garuda Pancasila	5	1	-	4
30.	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	2	-	-	2
31.	Tiang Bendera	13	13	-	-
32.	Kaca Hias	5	-	-	5
33.	Dispenser	2	-	-	2
34.	Palu Sidang	2	2	-	-
35.	Lambang Instansi	9	2	-	7
36.	Karpet	1	-	-	1
37.	Gordyn/Kray	3	-	-	3
38.	Bracket Standing	2	2	-	-
39.	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	1	-	-
40.	UPS	9	7	-	2
41.	Telephone	1	1	-	-
42.	Pesawat telephone	2	-	-	2

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2021

43.	Faximile	1	1	-	-
44.	Fingerprint	1	1	-	-
45.	Kursi Dorong	2	2	-	-
46.	Komputer Jaringan Lainnya	2	1	-	1
47.	Genset	1	1	-	-
48.	TV Media				
49.	Meja Kayu	73	72	-	1
50.	Kursi Besi Metal	237	177	-	60
51.	Kursi Kayu	67	12	-	55
52.	Sice	12	10	-	2
53.	Bangku Kayu Panjang Besi	30	30	-	-
54.	Bangku Kayu Panjang Kayu	12	12	-	-
55.	Meja Komputer	6	-	-	6
56.	Tempat Tidur Kayu	2	2	-	-
57.	Meja Telepon	4	4	-	-
58.	Meja Resepsionis	1	-	-	1
59.	Sketsel	1	-	-	1
60.	Meja Makan kayu	1	1	-	-
61.	Pot Bunga	7	7	-	-
62.	Partisi	6	4	-	2
63.	Gantungan Jas	3	-	-	3
64.	Jam Elektronik	10	-	-	10
65.	Almari Besi	10	10	-	-
66.	Almari Kayu	25	25	-	-
67.	Rak Besi	20	16	-	4
68.	Rak Kayu	7	2	-	5
69.	Filing Cabinet Besi	14	4	-	10
70.	Filing cabinet Kayu	1	1	-	-
71.	Brandkas	2	2	-	-
72.	Cctv	1	1	-	-
73.	Papan Visual/Papan Nama	10	10	-	-
74.	White Board	6	-	-	6
75.	Peta	1	-	-	1
76.	Lcd Projector	2	2	-	-
77.	Mesin Antrian	1	1	-	-
78.	Perkakas Kantor Lainnya	5	-	-	5
79.	Mesin Ketik Manual	11	-	-	11
80.	Mesin Hitung Elektronik	2	-	-	2

81.	Mesin Fotocopy	1	-	-	1	
82.	Monografi	36	36	-	-	
83.	Bahan Kartografi Lainnya	1	-	-	1	
84.	Piala	6	-	-	6	
85.	Piagam	2	-	-	2	
86.	Software Komputer	1	-	-	1	
87.	Aset Tak Berwujud	1	1	-	-	

## 2. KEGIATAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Di bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- ) Pengajuan usul Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- ) Pengajuan usul Penghapusan Barang Milik Negara terhadap barang hasil bongkaran renovasi gerung.

Melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan baik gedung kantor utama maupun rumah dinas pegawai Pengadilan Agama Ambarawa.

## C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Saat ini implementasi teknologi informasi adalah sebuah keharusan dalam upaya mendukung kegiatan operasional pegawai Pengadilan Agama Ambarawa. Bisa dikatakan tanpa adanya teknologi informasi maka kegiatan operasional suatu kantor tidak akan berjalan secara optimal bahkan bisa dikatakan mati. Untuk mendukung kelancaran pekerjaan dalam hal dukungan Teknologi Informasi maka Pengadilan Agama Ambarawa melakukan upaya – upaya yang dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut :

### IMPLEMENTASI E-COURT

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Badan peradilan yang berada dibawah MA RI salah satunya adalah Pengadilan Agama Ambarawa yang berada di bawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Agama Ambarawa

merupakan Pengadilan Agama Kelas 1B yang bertempat di Kabupaten Semarang dengan jumlah 1000-2900 perkara dalam satu tahun.

Berdasarkan Perma No. 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara peradilan secara elektronik, mengikuti ketentuan Pasal 2 Ayat (4) undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Disamping itu, dalam Perma No. 3 tahun 2018 Pasal 22 menyebutkan ketua atau kepala pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan proses serta layanan administrasi perkara secara elektronik. Guna mendukung hal ini MA RI menyediakan fasilitas layanan administrasi perkara dipengadilan secara elektronik yang disebut Elektronik Court (*e-Court*). Saat ini, *e-Court* berlaku dan diterapkan diseluruh badan peradilan, kecuali pada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Agama Ambarawa telah menerapkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

#### IMPLEMENTASI SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan sebuah aplikasi berbasis website yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2021 dimana berfungsi sebagai aplikasi yang dipergunakan untuk menatausahakan perkara yang diterima oleh pengadilan mulai dari Pendaftaran hingga terbitnya produk pengadilan berupa Putusan. Aplikasi yang awalnya dikembangkan di lingkungan peradilan umum ini kini sudah mencapai versi 4.1.1 yang saat ini sudah bisa diimplementasikan di seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. Sebagaimana pengadilan lainnya, Pengadilan Agama Ambarawa juga secara langsung melakukan implementasi aplikasi SIPP ini. Diharapkan dengan adanya implementasi SIPP secara menyeluruh maka pelayanan kepada para pencari keadilan dapat lebih cepat, professional dan transparan.

## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di lingkungan Peradilan terdapat beberapa jenis Pelayanan Publik unggulan yang disajikan bagi masyarakat diantaranya Akreditasi Penjaminan Mutu, Perkara Prodeo, Pelayanan Bantuan Hukum, Sidang Keliling dan sebagainya.

#### D. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi atau pentauliahian adalah pengakuan terhadap lembaga yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Pengakuan oleh suatu jawatan tentang adanya wewenang seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya. Adapun Penjaminan Mutu adalah Serangkaian proses yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan. Kegiatan Akreditasi ini merupakan pengembangan dari kegiatan Sertifikasi ISO yang dilakukan oleh pengadilan guna mencapai optimalisasi, efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan kegiatan di lingkungan pengadilan.



Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Ambarawa dengan segala keterbatasan yang dimiliki alhamdulillah berhasil melakukan proses Akreditasi Penjaminan Mutu dan dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Asessor Eksternal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mendapat predikat A (Excellent). Hasil tersebut merupakan pondasi awal dilakukannya standarisasi pelayanan yang berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat yang diharapkan dapat terus meningkat di tahun berikutnya. Sedangkan untuk tahun 2021 belum diketahui predikat Akreditasi Penjaminan Mutu karena masih menunggu hasil dari Asessor Eksternal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

#### E. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau lembaga Pemerintah di Indonesia terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut "PTSP"). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat sebagai wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai salah satu direktorat yang ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan

surat Keputusan dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Agama.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Agama Ambarawa ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- 1) Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan,
- 2) Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan,
- 3) Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke *backoffice* untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ambarawa,

- 2) Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,
- 3) Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer,
- 4) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

#### F. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Mahkamah Agung (MA) meluncurkan 9 inovasi aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Aplikasi tersebut untuk memudahkan para pencari keadilan mengakses pelayanan publik di Pengadilan Agama Ambarawa.

Adapun 9 inovasi aplikasi tersebut diantaranya, Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Informasi Perkara dan Informasi Produk Pengadilan Agama, Aplikasi Antrean Sidang, Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ & TNP2K), Command Center Badilag, Aplikasi e-Eksaminasi, Aplikasi PNBPN, e-Register Perkara, e-Kepastian Jadwal Persidangan Perkara.

Selain itu terdapat inovasi dari Pengadilan Agama Ambarawa yaitu Sistem Informasi Manajemen Whatsapp (SIM-W) dan Sistem informasi pencarian akta cerai.

Aplikasi tersebut bertujuan untuk mendukung penerapan sistem peradilan secara elektronik (e-Litigasi) di lingkungan Peradilan Agama. Selain itu, juga diperuntukkan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengakses pelayanan publik di Pengadilan Agama, seperti kepastian jadwal persidangan tanpa perlu penumpukan antrean.

Serta, memberikan kemudahan mengakses layanan prodeo tanpa melampirkan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) dengan aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ & TNP2K).

## BAB VI

### PENGAWASAN

#### A. INTERNAL

Berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/III/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan, Pengawasan Internal dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan bulanan maupun triwulan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yaitu meliputi :

1. Pelaksanaan tugas pokok kepaniteraan, yaitu administrasi perkara dan administrasi persidangan;
2. Pelaksanaan tugas pokok kesekretariatan yaitu administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi umum;
3. Evaluasi penyelenggaraan manajemen peradilan yaitu kepemimpinan, kinerja peradilan, kedisiplinan dan pelayanan publik;

Sebagai tindak lanjut pengawasan Internal, pada Pengadilan Agama Ambarawa menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Tentang Hakim Pengawas Bidang, dan dalam kurun satu tahun (tahun 2021) Hakim Pengawas bidang melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : W11-A33/0184/PS.00/I/2021 tanggal tanggal 04 Januari 2021 dan diperbaharui, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : W11-A33/3541/PS.00/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 terhitung mulai bulan Agustus 2021 susunan Hakim pengawas bidang sebagai berikut :

#### DAFTAR HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

NO	NAMA	PANGKAT/ JABATAN	HAKIM PENGAWAS
1	Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy., M.Sy. NIP. 19721231 200112 1 007	Hakim Madya Pratama / Wakil Ketua	Koordinator Hakim Pengawasan Bidang
2	Siti Khoiriyah, S.H.I, M.H NIP. 19680212 199403 1 007	Hakim Madya Utama	- Bidang Administrasi Persidangan - Bidang Administrasi Perkara
3	Rashif Imany, S.H.I, M.S.I NIP. 19851129 201101 1 005	Hakim Pratama Utama	- Bidang Administrasi Umum dan Keuangan : - Bidang Administrasi Kepegawaian dan Ortala

			- Bidang Administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
4	Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. NIP. 19800125 200805 2 002	Hakim Pratama Utama	- Bidang Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik

Para Hakim Pengawas Bidang dalam melaksanakan tugasnya dengan bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Sesuai petunjuk setiap tiga bulan sekali hakim Pengawas Bidang melaksanakan tugas pengawasan di bawah koordinator Wakil Ketua, akan tetapi mengingat pentingnya pengawasan intern di Pengadilan Agama Ambarawa yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, maka dipandang perlu melakukan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang setiap bulan dan dua bulan kedepan melakukan pembinaan dan tindak lanjut dari hasil temuannya dan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Ambarawa setiap tiga bulan sekali.

## B. EVALUASI

Dalam kaitannya dengan pengawasan internal, Pengadilan Agama Ambarawa sebagai institusi di bawah Mahkamah Agung RI yang melakukan pembinaan terhadap peradilan agama memiliki komitmen penuh untuk mengimplementasikan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 maupun Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2019.

Komitmen tersebut, salah satunya diwujudkan dengan membentuk Tim Monitoring Program Prioritas Pembaruan serta menetapkan 7 program prioritas pembaruan yang tertuang didalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0014/DjA/SK/KU/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011.

### 1. PROGRAM PENYELESAIAN PERKARA

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah. Pasca penyatuatapan lembaga peradilan agama dibawah Mahkamah Agung RI pada bulan Juni 2004, perkara yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama ada kecenderungan meningkat. Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama pada enam tahun terakhir (2015, 2016, 2018, 2019,2020,2021) adalah:

Tahun	Jumlah Perkara Masuk
2015	1.439
2016	1.386
2017	1.338
2018	1.430
2019	1.599
2020	1.641
2021	2.837

Dari data tersebut, bila dibandingkan dengan tahun 2015, perkara yang diterima tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 53 perkara atau - 3,68 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, perkara yang diterima tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 48 perkara atau -3,46 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, perkara yang diterima tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 92 perkara atau 6,88 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, perkara yang diterima tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 169 perkara atau 11,82 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, perkara yang diterima tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 42 perkara atau 2,63 %. Begitu juga bila dibandingkan dengan tahun 2020, perkara yang diterima tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1.192 perkara atau 70,63 %.

Sementara itu bila dilihat dari sisa perkara pada enam tahun terakhir (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) ada kecenderungan menurun, hal ini disebabkan karena peningkatan kinerja pegawai dalam proses penyelesaian perkara didukung oleh sumber daya yang cukup memadai. kecuali pada tahun 2018 dimana sisa perkara meningkat sebab jumlah hakim yang menangani penyelesaian perkara mengalami penurunan yang signifikan sehingga sisa perkara meningkat. Namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah sisa perkara yang signifikan dikarenakan adanya penambahan 9 wilayah Kecamatan yang sebelumnya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga. Sehingga hingga saat ini Pengadilan Agama Ambarawa memiliki 19 wilayah hukum. Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Jumlah Sisa Perkara
2015	303
2016	296
2017	289
2018	337
2019	37
2020	23

2021

140

Kecenderungan jumlah perkara yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama menurun, kemungkinan di samping disebabkan karena meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, juga disebabkan karena meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama.

## 2. PROGRAM MANAJEMEN SDM

Sumber Daya Manusia sangat penting dalam menunjang pelayanan instansi yang menuju ke Pelayanan Prima. Pengadilan Agama Ambarawa selama tahun 2019 melakukan serangkaian manajemen SDM baik dalam peningkatan SDM secara manajerial maupun mental, diantaranya adalah sebagai berikut :

### a. Rapat Pembinaan Pegawai

Pengadilan Agama Ambarawa melakukan Rapat Pembinaan setiap bulan guna melakukan evaluasi terhadap permasalahan dan mencari solusi dalam permasalahan tersebut dalam bungkus permusyawarahan, ini dilakukan guna tercapainya kondisi kantor yang dinamis dan nyaman.

### b. Diklat Di Tempat Kerja (DDTK)

Adanya beberapa aplikasi baru yang diluncurkan pada tahun 2019 seperti aplikasi SIPP dan aplikasi SIWAS memunculkan suatu problema yaitu terkait pelaksanaan atau implementasi dari aplikasi tersebut. Terkait hal tersebut Pengadilan Agama Ambarawa berupaya untuk memaksimalkan semua elemen yang ada guna menunjang hal tersebut salah satunya dengan menyelenggarakan Diklat di Tempat Kerja atau Sosialisasi yang berkesinambungan.

### c. Pembinaan Hakim, Panitera, Jurusita, dan Operator IT

Seluruh Pengadilan Se-eks Karesidenan Semarang melakukan pembinaan hakim, panitera, jurusita dan operator IT guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan sharing antar Pengadilan Agama, Pembinaan ini selama tahun 2021 dibagi menjadi 2 semester dimana semester pertama pembinaan hakim, dan semester ke-2 adalah pembinaan panitera, jurusita dan operator IT. Pengadilan Agama Ambarawa berperan aktif dalam kegiatan tersebut dan mengirimkan pegawainya guna mendapatkan pelatihan maupun sharing dan untuk kemajuan Pengadilan Agama Ambarawa.

### d. Apel Senin Pagi

Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021 secara rutin menyelenggarakan apel senin pagi setiap minggunya. Acara apel senin pagi ini biasanya diisi dengan pembinaan dan pengarahan singkat yang disampaikan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Ambarawa.

### 3. PROGRAM PENGELOLAAN WEBSITE

Website merupakan kawal depan bagi wajah kantor di dunia virtual, sehingga bisa dikatakan bahwa website merupakan kantor kedua selain kantor utama di dunia nyata. Konten sebuah website secara tidak langsung juga menunjukkan isi dari sebuah kantor secara keseluruhan. Memang seringkali kita tidak sadar bahwa informasi yang terdapat di dalam website itu sangatlah luas bahkan melebihi informasi yang bisa didapatkan di dunia nyata, sehingga bisa dikatakan bahwa ketersediaan suatu website merupakan suatu keharusan beserta segala informasi yang terkandung didalamnya. Pengelolaan website di lingkungan peradilan agama didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu pedoman, selain SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi di Pengadilan yang menghapus SK KMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Berbekal 2 (dua) peraturan tersebut Pengadilan Agama Ambarawa berupaya menyajikan informasi sesuai dengan peraturan yang terdapat didalamnya.

Di era globalisasi ini peran teknologi informasi sangatlah vital dalam kemudahan dalam mendapatkan informasi yang informatif, akurat dan efisien. Salah satunya adalah website sebagai media informasi sekaligus sebagai wajah peradilan, semua informasi baik kegiatan, laporan keuangan, inventaris, perkara, bahkan pengaduan, saran dan kritik pun disajikan dalam bentuk satu rangkaian yang dinamis dalam wadah website.

Pengadilan Agama Ambarawa selalu mencoba memberikan yang terbaik dalam menyajikan informasi dengan media website ini, ditahun 2021 Pengadilan Agama Ambarawamelakukan perbaikan website, diantaranya dari sisi user interface (antar muka pengguna) agar benar-benar user friendly, begitu pula dalam updating konten/isi website itu sendiri, melakukan updating informasi yang aktual.

Pembentukan TIM IT pada Pengadilan Agama Ambarawa sebagai bentuk keseriusan Pengadilan Agama Ambarawa dalam membangun sistem yang moderen, efisien, efektif dan akuntabiliti dalam penyajian laporan-laporan guna memenuhi kebutuhan pencari keadilan akan informasi maupun pihak lain yang membutuhkan informasi guna tercapainya pelayanan prima 1x24 jam. Poin-poin dalam pengelolaan website diantaranya adalah :

a. Bidang kesekretariatan

1) Keuangan

Guna tercapainya Transparansi Anggaran, Pengadilan Agama Ambarawa melakukan updating dalam bidang keuangan di Pengadilan Agama Ambarawa di tahun 2021 antara lain :

- a) DIPA  
DIPA yang diterima Pengadilan Agama Ambarawa di masukan sebagai konten website sebagai bentuk Transparansi Anggaran selama 2021
  - b) LRA  
Realisasi Anggaran 2021 di sajikan dalam bentuk kolom perbulan
  - c) PNBP  
PNBP disajikan dalam bentuk kolom sebagai bentuk transparansi anggaran.
- 2) Umum
- a) Data Inventaris  
Data inventaris barang di sajikan dalam konten website agar pencari informasi dengan mudah mengetahui keadaan dan barang yang dimiliki kantor Pengadilan Agama Ambarawa guna tercapainya Transparansi
  - b) Neraca SIMAK BMN
  - c) Persediaan
- 3) Kepegawaian
- a) DUK  
DUK Pengadilan Agama Ambarawa disajikan update setiap tahun sekali dan untuk profil pegawai di update berkala setiap ada perubahan pegawai
  - b) Statistik Pegawai  
Statistik pegawai disajikan agar pencari informasi dengan mudah mengetahui keadaan pegawai Pengadilan Agama Ambarawa
- b. Bidang Kepaniteraan
- 1. Pelayanan Perkara  
Pelayanan perkara disajikan berupa konten layanan-layanan perkara seperti syarat pendaftaran, biaya perkara sehingga sangat informatif bagi para pencari keadilan
  - 2. Informasi Perkara  
Informasi perkara ini bisa dalam bentuk statistik perkara, putusan, dan informasi-informasi lainnya yang sekiranya dibutuhkan oleh pencari keadilan maupun pihak lain.
- c. Lain-lain
- Pengaduan Online dan bukutamu menjadi sarana kritik dan saran untuk Pengadilan Agama Ambarawa, ini sangat efektif dimana ketika para pencari keadilan segan untuk menyampaikannya secara langsung mereka bisa menyampaikannya melalui buku tamu atau surat elektronik.

#### 4. PROGRAM PELAYANAN PUBLIK DAN MEJA INFORMASI

Untuk memaksimalkan penerapan Meja Informasi di lingkungan peradilan agama, Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama. Pedoman ini memberikan ketentuan yang rinci tentang bagaimana seharusnya Meja Informasi harus diimplementasikan di seluruh Pengadilan Agama. Pengadilan harus dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan para pencari keadilan secara akurat dan cepat.

Selama ini di Kantor Pengadilan Agama Ambarawa sudah terdapat Meja Informasi yang merupakan pusat informasi dan pelayanan bagi publik, jadi hampir semua informasi baik informasi mengenai keperkaraan, kesekretariatan sampai pengaduan masyarakat ditampung dan ditangani di bagian meja informasi. Untuk mendukung pelayanan publik dan informasi, Pengadilan Agama Ambarawa juga menyediakan sebuah komputer sentral berbasis sentuhan (KIOSK) dimana pada komputer tersebut bisa menampilkan informasi perkara secara realtime baik keadaan perkara, jadwal sidang, sampai keuangan perkara bagi para pencari keadilan. Selain itu juga terdapat sebuah Media Center berupa Televisi yang menayangkan jadwal sidang dan perkara yang diputus pada hari tersebut.

Selain hal tersebut diatas, dengan diluncurkannya aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) maka semakin memantapkan Pengadilan Agama Ambarawa dalam pemberian layanan informasi secara profesional, sebab masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung akan terlindungi hak-haknya dalam mendapatkan informasi sesuai dengan koridor yang berlaku.

---

#### 5. PROGRAM IMPLEMENTASI SIPP

Untuk memanfaatkan teknologi informasi pada proses administrasi peradilan di Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Ambarawa telah memanfaatkan aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama yaitu Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Aplikasi SIPP ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerapan sekaligus otomatisasi Pola Bindalmin di lingkungan peradilan agama. Sebagai sebuah sistem manajemen perkara (case management system), program aplikasi ini sangat bermanfaat di bidang administrasi peradilan. Proses pengolahan dokumen perkara dilakukan dengan lebih cepat, efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan bisa lebih ditingkatkan. Ia juga bermanfaat mengatasi persoalan peningkatan perkara yang tidak berbanding lurus dengan tersedianya tenaga pelaksana administrasi perkara.

Faktor pendukung keberhasilan implementasi aplikasi SIPP di lingkungan peradilan agama, antara lain komitmen pimpinan/kebijakan, kualitas SDM, infrastruktur, dan anggaran pemeliharaan. Dari mulai aplikasi SIPP ini dilahirkan, Pengadilan Agama Ambarawa terus berupaya meningkatkan fungsi dan kegunaan aplikasi tersebut di segala lini bidang administrasi kepaniteraan. Hal tersebut dapat dilihat dari implementasi SIPP mulai dari proses Pendaftaran Perkara sampai dengan Penerbitan Akta Cerai. Selain itu dilihat dari validitas data yang dihasilkan, apabila dilihat dari portal yang khusus menangani data SIPP yaitu [sipp.mahkamahagung.go.id](http://sipp.mahkamahagung.go.id), prosentase update dan validitas data Pengadilan Agama Ambarawa hampir selalu diatas 75 %.

---

#### 6. PROGRAM PERKARA PRODEO

Perkara Prodeo merupakan salah satu dari Program Justice For All yang dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Peradilan Agama dimana program ini bertujuan untuk memberikan bantuan finansial kepada Pihak Berperkara yang masuk kategori tidak mampu atau berperkara secara Cuma-Cuma. Pada pelaksanaannya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, Pengadilan Agama Ambarawa selalu mendapatkan alokasi anggaran untuk Perkara Prodeo.

---

#### 7. PENGAWASAN

Pada dasarnya tugas pengawasan adalah menjadi tugas pokok Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pengawasan meliputi tugas-tugas pemeriksaan teknis peradilan, pemeriksaan administrasi peradilan dan pemeriksaan administrasi umum. Selama tahun 2021 tidak ada pegawai Pengadilan Agama Ambarawa yang mendapatkan sanksi Disiplin baik yang sifatnya ringan maupun berat. Selain itu untuk proses pengawasan internal selalu dilakukan dengan melakukan pembinaan secara rutin setiap bulan yang dilakukan oleh Pimpinan atau secara berkala yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang sehingga alur kerja dan profesionalisme pegawai Pengadilan Agama Ambarawa selalu terjaga.

## BAB VII

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Ambarawa sudah berjalan dengan baik.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021 yakni sebesar 94,47 % perkara dari jumlah perkara yang diterima pada tahun berjalan sehingga target sisa perkara pada akhir tahun lebih sedikit dari sisa perkara tahun sebelumnya.
3. Pelaksanaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik meskipun demikian guna mengeliminir terjadinya kesalahan harus dilakukan pengawasan secara berkala.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik.
5. Penatausahaan bagian kepegawaian, umum dan keuangan, serta perencanaan telah dilaksanakan baik.
6. Pengadilan Agama Ambarawa merasakan sangat kekurangan Hakim dan pegawai, terutama untuk staf sekretariat.

#### B. REKOMENDASI

1. Agar kedepan belanja untuk kebutuhan operasional perkantoran bisa dinaikkan sesuai dengan kebutuhan riil operasional perkantoran.
2. Kedepan agar ada kenaikan pagu anggaran untuk belanja modal terkait sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung RI.
3. Agar dilakukan koordinasi dan pembinaan secara intensip kepada unsur Pejabat Pengadilan Agama Ambarawa agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu mempertahankan penyelesaian perkara sampai 100 % perkara yang diterima pada tahun berjalan.
4. Agar dilakukan secara berkala pembinaan dan pelatihan kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Ambarawa yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi maupun etika

pegawai guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan profesional, berwawasan luas, terampil dalam menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq mulia.

Demikian Laporan tahunan tahun 2021 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Ambarawa Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua lini, baik dari unsur hakim maupun non hakim dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawaban pelaksanaan kinerja Peradilan Agama Ambarawa kepada publik. Sudah barang tentu dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detil namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Peradilan Agama Ambarawa, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya 2021 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh bangsa dan negara. Aamiin.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwaamit Tharieq.

Ambarawa, 31 Desember 2021

Ketua  
Pengadilan Agama Ambarawa



**ISHAK LUBIS, S.AG**  
NIP. 19690622.199703.1.001

## DAFTAR PUSTAKA

Tim Penyusun Laporan Tahunan. 2020. Laporan Tahunan 2020 Pengadilan Agama Ambarawa.

Tim Penyusun LkJP 2018. 2019. LkJP 2018 Pengadilan Agama Ambarawa.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa. 2021. Laporan Bulanan Perkara Pengadilan Agama Ambarawa .

## LAMPIRAN

## KEPANITERAAN

### DATA DETIL PERKARA

#### SISA PERKARA TAHUN 2018

##### KEADAAN PERKARA

Dari 23 sisa perkara tahun 2020 tersebut dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

1) Izin Poligami	=	- perkara
2) Pencegahan Perkawinan	=	- perkara
3) Penolakan Perkawinan	=	- perkara
4) Pembatalan Perkawinan	=	- perkara
5) Kelalaian Kewajiban suami/istri	=	- perkara
6) Cerai Talak	=	10 perkara
7) Cerai Gugat	=	11 perkara
8) Harta Bersama	=	1 perkara
9) Penguasaan Anak	=	- perkara
10) Nafkah oleh ibu	=	- perkara
11) Hak-hak bekas istri	=	- perkara
12) Pengesahan anak	=	- perkara
13) Pencabutan Kekuasaan orang tua	=	- perkara
14) Perwalian	=	- perkara
15) Pencabutan Kekuasaan wali	=	- perkara
16) Penunjukan orang lain sebagai wali	=	- perkara
17) Ganti rugi terhadap wali	=	- perkara
18) Asal usul anak	=	- perkara
19) Penolakan Kawin campur	=	- perkara
20) Istbat Nikah	=	- perkara
21) Izin Kawin	=	- perkara
22) Dispensasi Kawin	=	- perkara

23) Wali adlol	=	- perkara
24) Ekonomi Syari'ah	=	- perkara
25) Kewarisan	=	- perkara
26) Wasiat	=	- perkara
27) Hibah	=	- perkara
28) Wakaf	=	- perkara
29) Sodaqoh / Zakat /Infaq	=	- perkara
30) P3HP/ penetapan Ahli Waris	=	- perkara
31) lain-lain	=	1 perkara
32) Ditolak	=	- perkara
33) Tidak diterima	=	- perkara
34) Gugur	=	- perkara
35) Dicoret dari pendaftaran	=	- perkara
36) Dicabut	=	- perkara

#### PENYELESAIAN PERKARA

Dari 2.720 sisa perkara yang diputus/diselesaikan pada tahun 2021, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

1) Izin Poligami	=	5 perkara
2) Pencegahan Perkawinan	=	- perkara
3) Penolakan Perkawinan	=	- perkara
4) Pembatalan Perkawinan	=	- perkara
5) Kelalaian Kewajiban suami/istri	=	- perkara
6) Cerai Talak	=	478 perkara
7) Cerai Gugat	=	1.104 perkara
8) Harta Bersama	=	3 perkara
9) Penguasaan Anak	=	1 perkara
10) Nafkah oleh ibu	=	- perkara
11) Hak-hak bekas istri	=	- perkara
12) Pengesahan anak	=	- perkara
13) Pencabutan Kekuasaan orang tua	=	- perkara
14) Perwalian	=	9 perkara

15) Pencabutan Kekuasaan wali	=	- perkara
16) Penunjukan orang lain sebagai wali	=	- perkara
17) Ganti rugi terhadap wali	=	- perkara
18) Asal usul anak	=	5 perkara
19) Penolakan Kawin campur	=	- perkara
20) Istbat Nikah	=	5 perkara
21) Izin Kawin	=	- perkara
22) Dispensasi Kawin	=	116 perkara
23) Wali adlol	=	5 perkara
24) Ekonomi Syari'ah	=	1 perkara
25) Kewarisan	=	2 perkara
26) Wasiat	=	- perkara
27) Hibah	=	1 perkara
28) Wakaf	=	- perkara
29) Sodaqoh / Zakat /Infaq	=	- perkara
30) P3HP/ penetapan Ahli Waris	=	1 perkara
31) lain-lain	=	46 perkara
32) Ditolak	=	5 perkara
33) Tidak diterima	=	5 perkara
34) Gugur	=	14 perkara
35) Dicoret dari pendaftaran	=	19 perkara
36) Dicabut	=	75 perkara

#### PERKARA TAHUN 2019

##### KEADAAN PERKARA

Dari 2.837 perkara yang diterima pada tahun 2021 tersebut, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

1) Izin Poligami	=	4 perkara
2) Pencegahan Perkawinan	=	- perkara
3) Penolakan Perkawinan	=	- perkara
4) Pembatalan Perkawinan	=	- perkara
5) Kelalaian Kewajiban suami/istri	=	- perkara

6) Cerai Talak	=	593 perkara
7) Cerai Gugat	=	1.709 perkara
8) Harta Bersama	=	9 perkara
9) Penguasaan Anak	=	1 perkara
10) Nafkah oleh ibu	=	- perkara
11) Hak-hak bekas istri	=	- perkara
12) Pengesahan anak	=	- perkara
13) Pencabutan Kekuasaan orang tua	=	- perkara
14) Perwalian	=	35 perkara
15) Pencabutan Kekuasaan wali	=	- perkara
16) Penunjukan orang lain sebagai wali	=	- perkara
17) Ganti rugi terhadap wali	=	- perkara
18) Asal usul anak	=	11 perkara
19) Penolakan Kawin campur	=	- perkara
20) Istbat Nikah	=	12 perkara
21) Izin Kawin	=	- perkara
22) Dispensasi Kawin	=	416 perkara
23) Ekonomi Syari'ah	=	- perkara
24) Wali adlol	=	7 perkara
25) Kewarisan	=	8 perkara
26) Wasiat	=	- perkara
27) Hibah	=	- perkara
28) Wakaf	=	- perkara
29) Sodaqoh/ Zakat / infaq	=	- perkara
30) P3HP / Penetapan Ahli waris	=	19 perkara
31) lain-lain	=	13 perkara
32) Pengangkatan Anak	=	- perkara

**PENYELESAIAN PERKARA**

Adapun 2.860 perkara yang diputus/diselesaikan pada tahun 2021, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

1) Izin Poligami	=	4 perkara
2) Pencegahan Perkawinan	=	- perkara
3) Penolakan Perkawinan	=	- perkara
4) Pembatalan Perkawinan	=	- perkara
5) Kelalaian Kewajiban suami/istri	=	- perkara
6) Cerai Talak	=	514 perkara
7) Cerai Gugat	=	1.527 perkara
8) Harta Bersama	=	3 perkara
9) Penguasaan Anak	=	0 perkara
10) Nafkah oleh ibu	=	- perkara
11) Hak-hak bekas istri	=	- perkara
12) Pengesahan anak	=	- perkara
13) Pencabutan Kekuasaan orang tua	=	- perkara
14) Perwalian	=	33 perkara
15) Pencabutan Kekuasaan wali	=	- `perkara
16) Penunjukan orang lain sebagai wali	=	- perkara
17) Ganti rugi terhadap wali	=	- perkara
18) Asal usul anak	=	9 perkara
19) Penolakan Kawin campur	=	- perkara
20) Istbat Nikah	=	6 perkara
21) Izin Kawin	=	- perkara
22) Dispensasi Kawin	=	413 perkara
23) Wali adlol	=	7 perkara
24) Ekonomi Syari'ah	=	0 perkara
25) Kewarisan	=	2 perkara
26) Wasiat	=	- perkara
27) Hibah	=	1 perkara
28) Wakaf	=	- perkara
29) Sodaqoh / Zakat /Infaq	=	- perkara

30) P3HP/ penetapan Ahli Waris	=	14 perkara
31) lain-lain	=	8 perkara
32) Ditolak	=	7 perkara
33) Tidak diterima	=	10 perkara
34) Gugur	=	21 perkara
35) Dicoret dari pendaftaran	=	4 perkara
36) Dicabut	=	138 perkara
37) Pengangkatan Anak	=	- perkara

---

#### RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS

Perkara yang disidangkan Pengadilan Agama Ambarawa sebanyak 2.860 perkara. Adapun dari segi produktivitas Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan dan gugatan selama tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Ketua Majelis : Drs. H. Musthofa Kamal, M.H.  
Hakim Anggota : -  
Perkara yang ditangani 120 perkara dan diselesaikan 120 perkara, sisa 0 perkara.
- b. Ketua Majelis : Ishak Lubis, S.Ag  
Hakim Anggota : -  
Perkara yang ditangani 358 dan diselesaikan 347 perkara, sisa 11 perkara.
- c. Ketua Majelis : Syamsul Hadi, S.AG., M.SY.  
Hakim Anggota : -  
Perkara yang ditangani 189 perkara dan diselesaikan 158 perkara, sisa 31 perkara.
- d. Ketua Majelis : Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota : -  
Perkara yang ditangani 595 perkara dan diselesaikan 595 perkara, sisa 0 perkara.
- e. Ketua Majelis : Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota : -  
Perkara yang ditangani 691 perkara dan diselesaikan 643 perkara, sisa 48 perkara.
- f. Ketua Majelis : Rashif Imany, S.H.I., M.S.I  
Hakim Anggota : -  
Perkara yang ditangani 907 perkara dan diselesaikan 857 perkara, sisa 50 perkara.

PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI

PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING

A. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING

Dari 10 perkara Pengadilan Agama Ambarawa yang diajukan ke tingkat Banding terdapat 8 putusan yang dikuatkan di tingkat Banding. Data perkara tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nomor Perkara Tk. I	Nomor Putusan Tk. Banding	Tanggal Putus
1	1414/Pdt.G/2021/PA.Amb	369/Pdt.G/2021/PTA.Smg	11-11-2021
2	274/Pdt.G/2021/PA.Amb	340/Pdt.G/2021/PTA.Smg	28-10-2021
3	548/Pdt.G/2021/PA.Amb	317/Pdt.G/2021/PTA.Smg	23-9-2021
4	461/Pdt.G/2021/PA.Amb	251/Pdt.G/2021/PTA.Smg	28-7-2021
5	1308/Pdt.G/2021/PA.Amb	299/Pdt.G/2021/PTA.Smg	12-7-2021
6	1127/Pdt.G/2021/PA.Amb	210/Pdt.G/2021/PTA.Smg	6-7-2021
7	858/Pdt.G/2021/PA.Amb	117/Pdt.G/2021/PTA.Smg	14-4-2021
8	844/Pdt.G/2021/PA.Amb	341/Pdt.G/2021/PTA.Smg	21-10-2021

B. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING

Dari 10 perkara Pengadilan Agama Ambarawa yang diajukan ke tingkat Banding terdapat 2 putusan yang dibatalkan di tingkat Banding. Data perkara tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nomor Perkara Tk. I	Nomor Putusan Tk. Banding	Keterangan
1.	0524/Pdt.G/2021/PA.Amb	383/Pdt.G/2021/PTA.Smg	Mengadili Sendiri
2.	0317/Pdt.G/2021/PA.Amb	245/Pdt.G/2021/PTA.Smg	Mengadili Sendiri

C. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG TIDAK DAPAT DITERIMA TK. BANDING

Dari 10 perkara Pengadilan Agama Ambarawa yang diajukan ke tingkat Banding tidak ada putusan pengadilan TK I yang tidak dapat diterima oleh Tk. Banding.

**D. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIAJUKAN KE TK. BANDING TETAPI BELUM DIPUTUS**

---

Dari 10 perkara Pengadilan Agama Ambarawa yang diajukan ke tingkat Banding tidak ada putusan pengadilan tingkat I yang diajukan ke tingkat Banding tetapi belum diputus.

**E. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DICABUT**

---

Dari 13 perkara Pengadilan Agama Ambarawa yang diajukan ke tingkat Banding tidak terdapat perkara yang dicabut. Data perkara tersebut adalah sebagai berikut :

---

**PERKARA YANG DIAJUKAN KASASI**

Data perkara yang dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebanyak 4 perkara yang terdiri dari 2 perkara tahun 2020 dan 2 perkara baru tahun 2021. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus sebanyak 3 perkara sehingga sisa perkara Kasasi tahun 2021 sebanyak 1 perkara.

**A. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. KASASI.**

---

Tidak ada perkara Pengadilan Agama Ambarawa yang diajukan ke tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat Kasasi.

**B. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN DIBATALKAN TK. KASASI.**

---

Tidak ada perkara yang diajukan oleh Pengadilan Agama Ambarawa yang dikuatkan tingkat banding dan dibatalkan di tingkat kasasi dengan data sebagai berikut :

**C. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN TIDAK DAPAT DITERIMA TK. KASASI.**

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** perkara yang dikuatkan tingkat banding dan tidak dapat diterima di tingkat kasasi dengan data sebagai berikut :

**D. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN DITOLAK TK. KASASI.**

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **1** Putusan yang dikuatkan Tk. Banding dan ditolak di tingkat Kasasi.

**E. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN BELUM DIPUTUS DI TK. KASASI.**

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **1** perkara Putusan yang dikuatkan Tk. Banding dan belum diputus di tingkat Kasasi.

**F. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN DIKUATKAN TK. KASASI.**

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **2** putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan di tingkat Kasasi.

**G. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN DIBATALKAN TK. KASASI.**

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan di tingkat Kasasi.

**H. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN BELUM DIPUTUS TK. KASASI.**

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **1** putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan belum diputus di tingkat Kasasi

---

**PERKARA YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI**

Data perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Agama adalah sebanyak 0 perkara.

**A. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN DIKUATKAN TK. KASASI YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.**

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

**B. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN DIBATALKAN TK. KASASI YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.**

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

**C. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN TIDAK DAPAT DITERIMA TK. KASASI YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.**

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

D. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN DIKUATKAN TK. KASASI YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** perkara yang dibatalkan tingkat Banding dan dikuatkan tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat Peninjauan Kembali.

E. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN DIBATALKAN TK. KASASI YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

F. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN DIKUATKAN TK. KASASI YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

G. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN DIBATALKAN TK. KASASI YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

H. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN TIDAK DAPAT DITERIMA TK. KASASI YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

I. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN DIKUATKAN TK. KASASI YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

J. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN DIBATALKAN TK. KASASI YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

**K. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.**

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

**L. PUTUSAN PENGADILAN TK. BANDING YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.**

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

**M. PUTUSAN PENGADILAN TK. KASASI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.**

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

**N. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.**

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

**O. PUTUSAN PENGADILAN TK. BANDING YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.**

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

**P. PUTUSAN PENGADILAN TK. KASASI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.**

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

**Q. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG TIDAK DAPAT DITERIMA TK. PENINJAUAN KEMBALI.**

---

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. Peninjauan Kembali.

**R. PUTUSAN PENGADILAN TK. BANDING YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG TIDAK DAPAT DITERIMA TK. PENINJAUAN KEMBALI.**

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. Peninjauan Kembali.

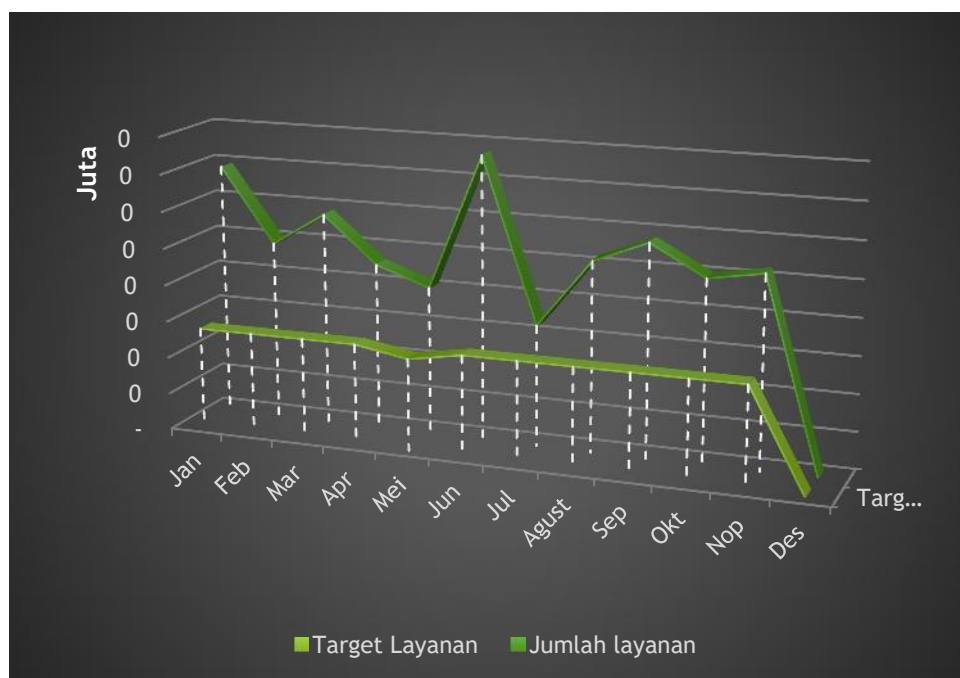
**S. PUTUSAN KASASI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG BELUM DIPUTUS TK. PENINJAUAN KEMBALI.**

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang belum diputus Tk. Peninjauan Kembali dengan data sebagai berikut :

**POS BANTUAN HUKUM**

Data pelaksanaan kegiatan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2021 adalah sebagai berikut :

REALISASI PELAKSANAAN POSBAKUM						
NO	Bulan	REALISASI PELAKSANAAN POSBAKUM				ANGGARAN DIPA
		Jam Layanan	Target Jumlah Layanan	Jumlah Layanan	Jumlah Perkara	
1	Januari	55	55	138	138	2.626.800
2	Februari	55	55	98	98	2.626.800
3	Maret	55	55	116	116	2.985.000
4	April	55	55	91	91	2.835.750
5	Mei	50	50	81	81	2.447.700
6	Juni	55	55	154	154	2.835.750
7	Juli	55	55	66	66	2.447.700
8	Agustus	55	55	103	103	2.626.800
9	September	55	55	115	115	2.985.000
10	Oktober	55	55	99	99	2.597.700
11	November	55	55	104	104	2.985.000
12	Desember	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		600	600	1.165	1.165	30.000.000



# SEKRETARIAT

## KEGIATAN SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

### STATISTIK PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

1	KETUA	-	-	-	-	1	-	-	1	
2	WAKIL KETUA	-	-	-	-	-	1	-	1	
3	HAKIM	-	-	-	-	-	3	-	3	
4	PANITERA	-	-	-	-	-	1	-	1	
5	SEKRETARIS	-	-	-	-	-	1	-	1	
6	PANMUD HUKUM	-	-	-	-	1	-	-	1	
7	PANMUD GUGATAN	-	-	-	-	1	-	-	1	
8	PANMUD PERMOHONAN	-	-	-	-	1	-	-	1	
9	PANITERA PENGGANTI	-	-	-	-	4	1	-	5	
10	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	-	-	-	-	1	-	-	1	
11	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	-	-	-	-	1	-	-	1	
12	KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	-	-	-	-	-	1	-	1	
13	JURUSITA	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	JURUSITA PENGGANTI	-	-	2	-	-	-	-	2	
15	STAF	-	-	-	1	2	-	-	3	
<b>JUMLAH</b>		-	-	2	1	12	8	-	23	
		<b>23</b>								

STATISTIK PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG

NO	JABATAN	GOLONGAN				
		I	II	III	IV	JML
1	2	7	12	17	22	23
1	KETUA	-	-	-	1	1
2	WAKIL KETUA	-	-	-	1	1
3	HAKIM	-	-	3	-	3
4	PANITERA	-	-	-	1	1
5	SEKRETARIS	-	-	1	-	1
6	PANMUD HUKUM	-	-	1	-	1
7	PANMUD GUGATAN	-	-	1	-	1
8	PANMUD PERMOHONAN	-	-	1	-	1
9	PANITERA PENGGANTI	-	-	5	-	5
10	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	-	-	1	-	1
11	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	-	-	1	-	1
12	KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	-	-	1	-	1
13	JURUSITA	-	-	-	-	-
14	JURUSITA PENGGANTI	-	2	-	-	2
15	STAF	-	1	2	-	3
JUMLAH		-	3	17	3	23

STATISTIK PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	JABATAN	GOLONGAN		
		L	P	JML
1	2	7	12	23
1	KETUA	1	-	1
2	WAKIL KETUA	1	-	1
3	HAKIM	1	2	3
4	PANITERA	1	-	1
5	SEKRETARIS	-	1	1
6	PANMUD HUKUM	-	1	1
7	PANMUD GUGATAN	1	-	1
8	PANMUD PERMOHONAN	1	-	1
9	PANITERA PENGGANTI	2	3	5
10	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	1	-	1
11	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	-	1	1
12	KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	1	-	1
13	JURUSITA	-	-	-
14	JURUSITA PENGGANTI	2	-	2
15	STAF	1	2	3
JUMLAH		13	10	23

## STATISTIK PEGAWAI BERDASARKAN RENTANG USIA

NO	JABATAN	GOLONGAN								JML
		<25	25-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	>56	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KETUA	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	WAKIL KETUA	-	-	-	-	-	1	-	-	1
3	HAKIM	-	-	-	1	2	-	-	-	3
4	PANITERA	-	-	-	-	-	-	1	-	1
5	SEKRETARIS	-	-	-	-	1	-	-	-	1
6	PANMUD HUKUM	-	-	-	-	-	-	-	1	1
7	PANMUD GUGATAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1
8	PANMUD PERMOHONAN	-	-	-	-	1	-	-	-	1
9	PANITERA PENGGANTI	-	-	-	4	1	-	-	-	5
10	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1
11	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1
12	KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1
13	JURUSITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	JURUSITA PENGGANTI	-	-	-	-	-	-	1	1	2
15	STAF	-	1	1	1	-	-	-	-	3
JUMLAH		-	1	2	9	5	1	3	2	23
		23								

SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2021 adalah sebanyak 23 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Ishak Lubis, S.Ag	Ketua	
2.	Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy., M.Sy.	Wakil Ketua	
3.	Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.	Hakim	
4.	Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.	Hakim	
5.	Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.	Hakim	
6.	Muh Amin, S.H., M.H.	Panitera	
7.	Fenia Ariasti, S.E., M.H.	Sekretaris	
8.	Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H.	Panitera Muda Gugatan	
9.	Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy.	Panitera Muda Permohonan	
10.	Dra. Widad	Panitera Muda Hukum	
11.	Heri Sulistiono, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
12.	Martasaputra Ardhy Ristiano Utomo, S.Kom., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
13.	Nur Arifah Kadir, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
14.	Nailatussa'adah, S.H.	Panitera Pengganti	
15.	Ambar Setiawati, S.H.I.	Panitera Pengganti	
16.	Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H.	Panitera Pengganti	
17.	Ahmad Roikan, S.Sy. SH	Panitera Pengganti	
18.	Sukarna, S.H.I.	Panitera Pengganti	
19.	Adnani	Juru Sita Pengganti	
20.	Sabar Budi Santosa	Juru Sita Pengganti	
21.	Dicka Martyastanti, S.Psi.	Analisis SDM Aparatur	
22.	Mutiara Candra Dewi, S.H.	CPNS	
23.	Irvan Yulianto, A.Md	CPNS	

KEGIATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

REALISASI ANGGARAN DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	Bulan	REALISASI BELANJA				TOTAL REALISASI DIPA
		PEGAWAI	BARANG OPERASIONAL	BARANG NON OPERASIONAL	MODAL	
1	Januari	172.252.431	0	0	0	172.252.431
2	Februari	187.869.072	208.003.242	0	1.864.900	569.989.645
3	Maret	183.945.152	78.884.116	0	140.045.500	972.864.413
4	April	203.931.360	56.093.000	0	391.451.500	1.624.340.273
5	Mei	401.152.337	43.202.852	0	38.237.900	2.106.933.362
6	Juni	404.804.206	85.468.211	0	6.478.000	2.603.683.779
7	Juli	211.999.931	47.497.505	4.930.000	431.537.750	3.299.648.965
8	Agustus	205.313.161	80.568.805	0	115.000	3.585.645.931
9	September	206.450.187	56.344.476	0	102.021.000	3.950.461.594
10	Oktober	204.516.077	75.756.051	0	0	4.230.733.722
11	November	204.651.987	88.852.633	0	453.854.750	4.978.093.092
12	Desember	214.536.325	176.358.512	0	103.077.000	5.472.064.929



REALISASI ANGGARAN DIPA BADAN PERADILAN AGAMA

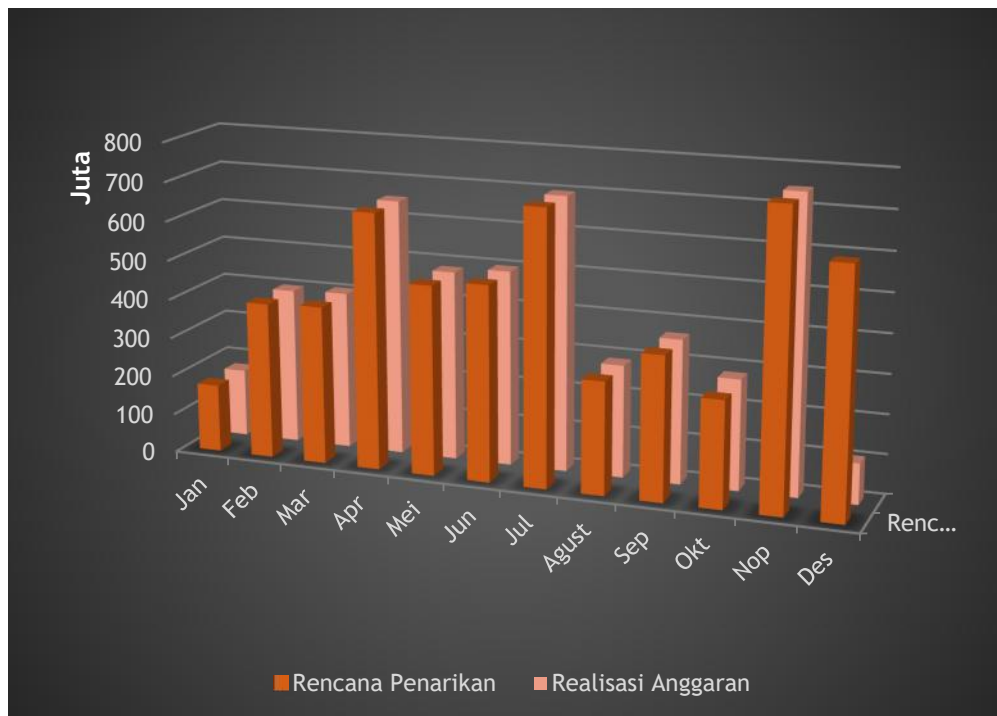
NO	Bulan	REALISASI BELANJA	TOTAL DIPA
1	Januari	-	-
2	Februari	2.626.800	2.626.800
3	Maret	2.626.800	2.626.800
4	April	3.685.000	3.685.000
5	Mei	3.885.750	3.885.750
6	Juni	4.197.700	4.197.700
7	Juli	2.835.750	2.835.750
8	Agustus	2.447.700	2.447.700
9	September	2.626.800	2.626.800
10	Oktober	2.985.000	2.985.000
11	November	2.597.700	2.597.700
12	Desember	2.985.000	2.985.000



KEGIATAN SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

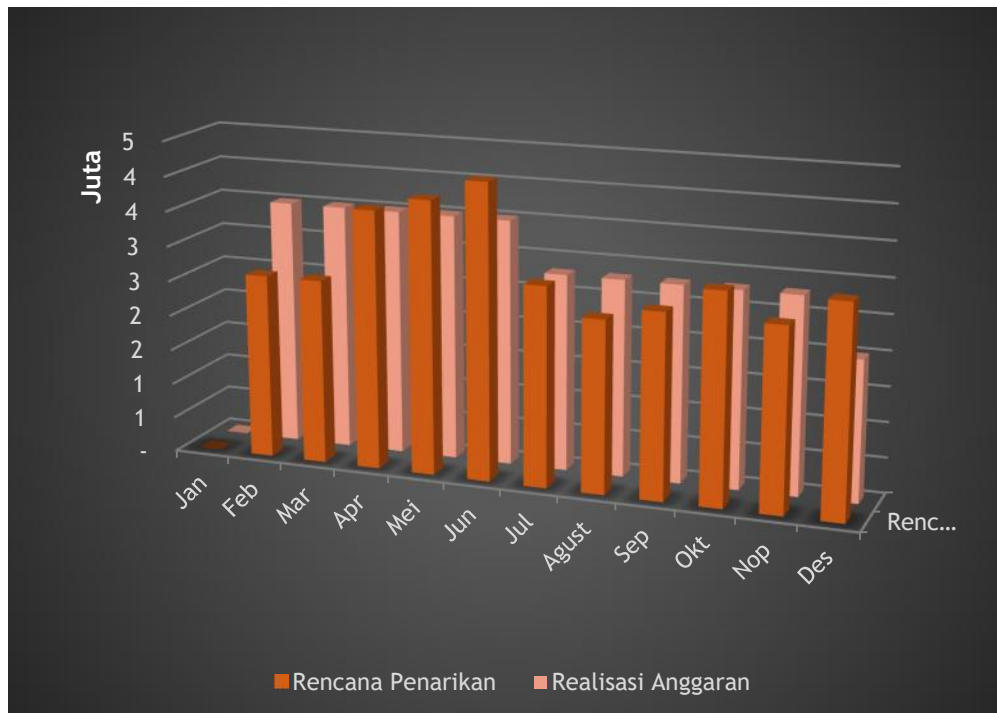
KOMPARASI RENCANA PENARIKAN ANGGARAN DENGAN REALISASI ANGGARAN DI PA BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	Bulan	RENCANA PENARIKAN	REALISASI ANGGARAN
1	Januari	172.252.424	172.252.431
2	Februari	397.737.203	397.737.214
3	Maret	402.874.750	402.874.768
4	April	651.475.846	651.475.860
5	Mei	482.593.089	482.593.089
6	Juni	496.750.387	496.750.417
7	Juli	696.965.186	695.965.186
8	Agustus	285.996.965	285.996.966
9	September	364.815.662	364.815.663
10	Oktober	270.569.982	280.272.128
11	November	747.209.364	747.359.370
12	Desember	621.065.142	103.077.000



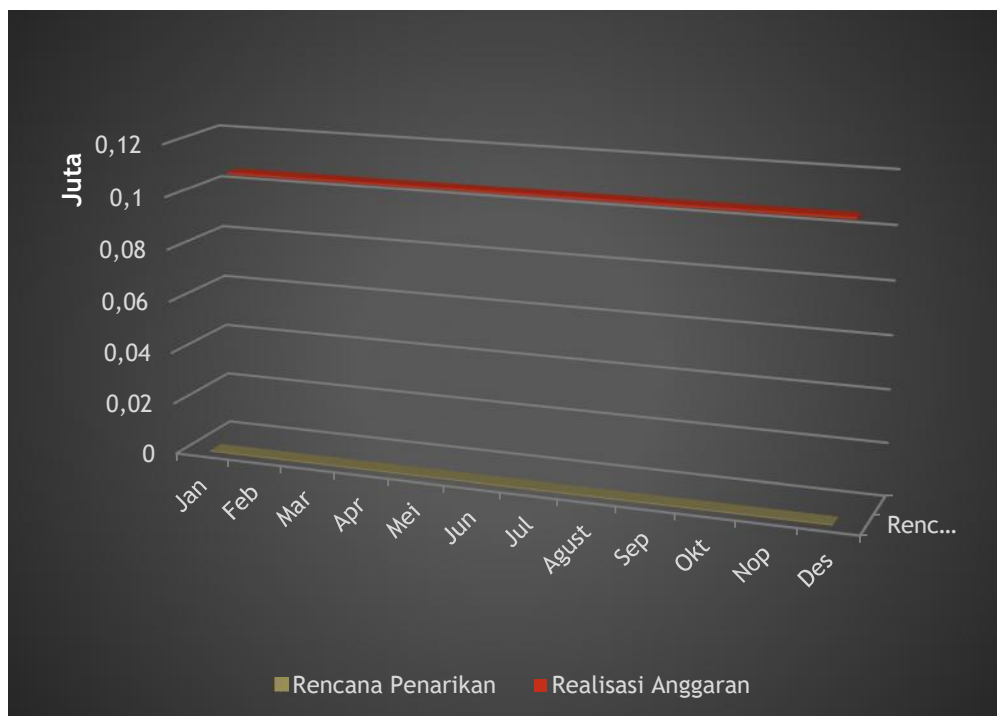
KOMPARASI RENCANA PENARIKAN ANGGARAN DENGAN REALISASI ANGGARAN DI PA BADAN PERADILAN AGAMA

NO	Bulan	RENCANA PENARIKAN	REALISASI ANGGARAN
1	Januari	-	-
2	Februari	2.626.800	3.500.000
3	Maret	2.626.800	3.500.000
4	April	3.685.000	3.500.000
5	Mei	3.885.750	3.500.000
6	Juni	4.197.700	3.500.000
7	Juli	2.835.750	2.800.000
8	Agustus	2.447.700	2.800.000
9	September	2.626.800	2.800.000
10	Oktober	2.985.000	2.800.000
11	November	2.597.700	2.800.000
12	Desember	2.985.000	2.000.000



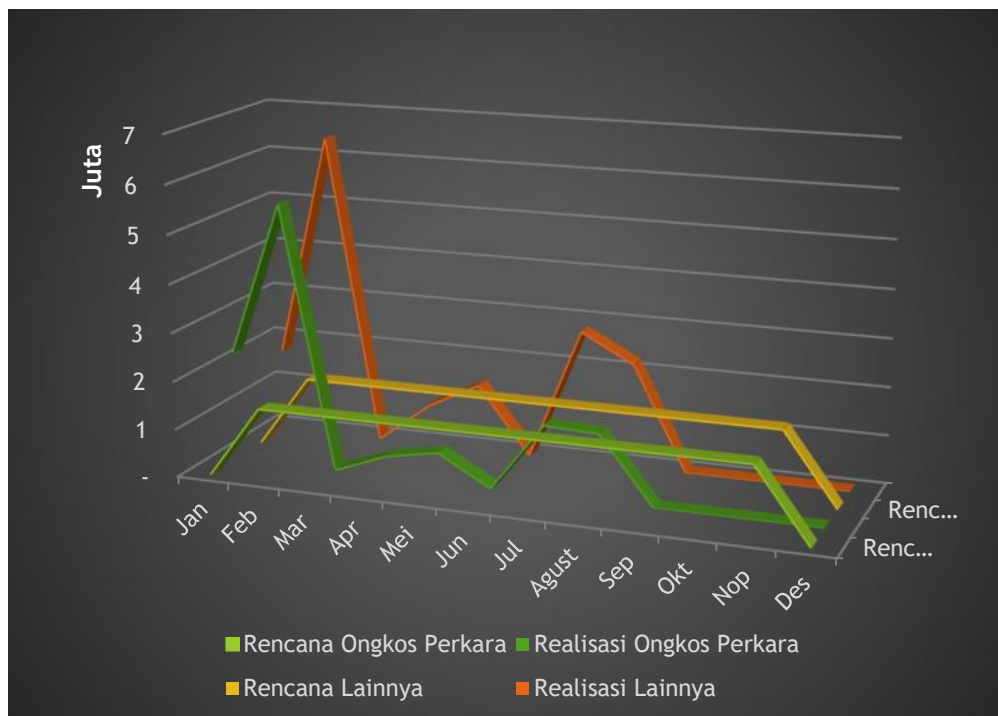
KOMPARASI RENCANA PENERIMAAN ANGGARAN DENGAN REALISASI PENERIMAAN ANGGARAN DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI

No.	Bulan	RENCANA PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN
1	Januari	-	104.643
2	Februari	-	104.643
3	Maret	-	104.643
4	April	-	104.643
5	Mei	-	104.643
6	Juni	-	104.643
7	Juli	-	104.643
8	Agustus	-	104.643
9	September	-	104.643
10	Oktober	-	104.643
11	November	-	104.643
12	Desember	-	104.643



KOMPARASI RENCANA PENERIMAAN ANGGARAN DENGAN REALISASI PENERIMAAN ANGGARAN DIPA BADAN PERADILAN AGAMA

NO	Bulan	Ongkos Perkara		Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	
		RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI
1	Januari	0	2.280.000	0	1.730.000
2	Februari	1.500.000	5.440.000	1.500.000	6.389.500
3	Maret	1.500.000	0	1.500.000	0
4	April	1.500.000	420.000	1.500.000	840.000
5	Mei	1.500.000	620.000	1.500.000	1.400.000
6	Juni	1.500.000	0	1.500.000	
7	Juli	1.500.000	1.430.000	1.500.000	2.755.500
8	Agustus	1.500.000	1.390.000	1.500.000	2.171.000
9	September	1.500.000	0	1.500.000	0
10	Oktober	1.500.000	0	1.500.000	0
11	November	1.500.000	0	1.500.000	0
12	Desember		0		0



**DAFTAR REVISI DIPA**

Data revisi DIPA Pengadilan Agama Ambarawa tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

---

**DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (005.01)**

No	Jenis Revisi	Tanggal Revisi
1	Revisi Halaman III	01-07-2021
2	Optimalisasi	28-09-2021
3	Penambahan Pagu Anggaran	14-10-2021
4	Revisi Halaman III	01-12-2021

---

**DIPA BADAN PERADILAN AGAMA (005.04)**

No	Jenis Revisi	Tanggal Revisi
1.	- NIHIL -	